

**PENGARUH PENERAPAN AUDIT SEKTOR PUBLIK  
TERHADAP KUALITAS KINERJA PEMERINTAH  
DAERAH**

( Studi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong )

**OLEH**

**DIKI CHANDRA**  
**E.11.17.043**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana**



**PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
GORONTALO  
2021**

## LEMBAR PENGESAHAN

# PENGARUH PENERAPAN AUDIT SEKTOR PUBLIK TERHADAP KUALITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

( Studi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong )

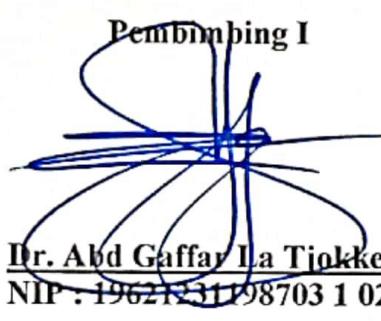
OLEH  
DIKI CHANDRA  
E.11.17.043

## SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar sarjana dan  
telah disetujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal

.....

Pembimbing I



Dr. Abd Gaffar Ia Tjokke, M.Si  
NIP : 19621231198703 1 029

Pembimbing II



Melinda Ibralfim, SE., MSA  
NIDN : 0920058601

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PENERAPAN AUDIT SEKTOR PUBLIK  
TERHADAP KUALITAS KINERJA PEMERINTAH  
DAERAH**

( Studi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong )

Oleh

Diki Chandra

E11.17.043

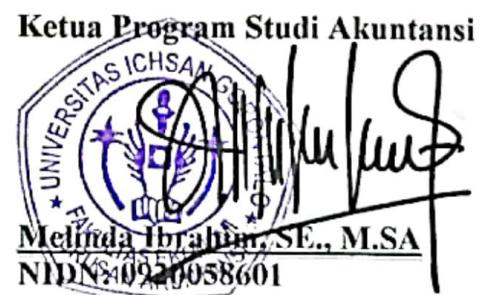
Diperiksa Oleh Panitia Ujian Strata Satu (S1)  
Universitas Ichsan Gorontalo

Tim Penguji dan Pembimbing :

1. Dr. Arifin, SE., M.Si
2. Reyther Biki, SE., M.Si
3. Riska Yunika Ramly, SE., M.Ak
4. Dr. Abd Gaffar La Tjokke, M.Si
5. Melinda Ibrahim, SE., M.SA

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui :



## **PERNYATAAN**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Gorontalo, Oktober 2021



**DIKI CHANDRA**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO :**

Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun niscaya dia akan melihat (balasan)nya.

(Q.S Al-Zalzalah : 7)

Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang yang beriman.

(Q.S Ali Imran : 139)

Janganlah kamu membandingkan dirimu dengan orang lain, sebab kamu dan orang lain mempunyai kelebihan dan kerungan masing-masing (Diki Chandra)

### **PERSEMBAHAN :**

Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini.

Saya persesembahkan karya sederhana ini sebagai wujud bakti kepada kedua orang tua tercinta saya. Ayah Alm. Mardudin O. Angila dan ibu Bidawati dan juga saudara kandung saya yang tidak pernah lelah dalam membesarkan saya, mendidik, menuntun, dan mendukung segala aktivitas akademik, serta senantiasa dan ikhlas dalam mendoakan kesuksesan dan keberhasilanku

**KAMPUSKU TERCINTA**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

## ***ABSTRACT***

***DIKI CHANDRA. E1117043. THE EFFECT OF THE IMPLEMENTATION OF THE PUBLIC SECTOR AUDIT ON THE PERFORMANCE QUALITY OF LOCAL GOVERNMENTS (A STUDY AT THE AGENCY FOR PERSONNEL AND HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT OF PARIGI MOUTONG DISTRICT)***

*This study aims to find out the effect of the implementation of public sector audits on the performance quality of local government (a study at the Personnel and Human Resources Development Agency of Parigi Moutong District) with 55 apparatuses as respondents. The type of data used is primary data. The data collection techniques carried out are questionnaires and interviews. The analysis method use multiple regression analysis using the SPSS version 21 program. The results of this study indicate that the Public Sector Audit (X) simultaneously has an effect on the Quality of Local Government Performance (Y) at the Personnel and Human Resources Development Agency by 0.988 (98,8%). There are external variables unexamined but affect the variable (Y) by 0. 321 (32,1%). Financial Audit (X1) variable has 0.223 (22.3%), Performance Audit (X2) gains 0.459 (45.9%), and Investigation Audit (X3) obtains 0.472 (47.2%). They partially have a positive and significant effect on the performance quality of local government (Y).*

*Keywords:* *public sector, audit, performance quality, local government*

## ABSTRAK

### **DIKI CHANDRA. E1117043. PENGARUH PENERAPAN AUDIT SEKTOR PUBLIK TERHADAP KUALITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PARIGI MOUTONG)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Audit Sektor Publik terhadap Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah (studi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong) dengan jumlah responden sebanyak 55 orang pegawai. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, dan wawancara. Metode analisis menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS versi 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Audit Sektor Publik (X) secara Simultan berpengaruh terhadap Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar 0,988 (98,8%), dan terdapat variabel luar yang tidak diteliti tetapi mempengaruhi variabel (Y) sebesar 0,321 atau 32,1%. Variabel Audit Keuanga (X1) sebesar 0,223 atau (22,3%), Audit Kinerja (X2) sebesar 0,459 atau (45,9%), Audit Ivestigasi (X3) sebesar 0,472 atau (47,2%) secara Parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Kata kunci: sektor publik, audit, kualitas kinerja, pemerintah daerah

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis haturkan atas kehadirat Allah SWT, karena limpahan hidayah dan karunianyahal sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kejahiliaan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan. Adapun judul dari skripsi ini berjudul : “**Pengaruh Penerapan Audit Sektor Publik Terhadap Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong ”.**

Dalam penelitian ini, peneliti sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun kearah perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Melalui kesempatan ini penulis penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muh Ichsan Gaffar SE., M.Ak, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo, Dr. Abdul Gaffar La Tjoke, SE., M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus sebagai Pembimbing I, Bapak Dr. Musafir SE., MM Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Melinda Ibrahim, SE., MSA Selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus sebagai Pembimbing II, Serta rekan-rekan mahasiswa yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan dan motifasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Orang Tua saya yang tidak pernah berhenti untuk mendukung dan selalu mendoakan peneliti. Kepada seluruh Keluarga yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang terlibat, dengan harapan semoga hasil penelitian ini dapat diterima dan bias bermanfaat bagi pembaca. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Gorontalo, 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1. Maksud Penelitian .....	7
1.3.2. Tujuan Penelitian.....	7

1.4 Manfaat Penelitian .....	8
------------------------------	---

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**9

2.1 Tinjauan Pustaka .....	9
2.1.1 Pengertian Audit .....	9
2.1.2 Pengertian Audit Sektor Publik .....	11
2.1.3 Jenis-Jenis Audit Sektor Publik .....	12
2.1.4 Berbagai Elemen dan Masalah Utama Audit .....	18
2.1.5 Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah .....	21
2.1.6 Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah .....	23
2.2 Kerangka Pemikiran.....	27
2.3 Hipotesis .....	28

## **BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN**30

3.1 Objek Penelitian .....	30
3.2 Metode Penelitian .....	30
3.2.1 Metode Penelitian Yang Digunakan.....	30
3.2.2 Operasional Variabel .....	31
3.2.3 Populasi dan Sampel.....	34
3.2.4 Sumber dan Cara Pengumpulan Data.....	36
3.2.5 Prosedur Pengujian Instrumen Penelitian .....	37

3.2.6	Metode Analisis Data .....	41
3.2.7	Jadwal Penelitian .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>43</b>
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
4.1.1	Sejarah Singkat Lokasi Penelitian .....	43
4.1.2	Tugas dan Fungsi.....	43
4.1.3	Visi dan Misi .....	44
4.1.4	Struktur Organisasi Lokasi Penelitian .....	45
4.1.5	Deskriptif Karakteristik Responden .....	46
4.2	Hasil Penelitian.....	48
4.2.1	Deskriptif Variabel Penelitian.....	48
4.2.2	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas .....	53
4.2.3	Analisis Data .....	57
4.3	Pembahasan .....	62
4.3.1	Pengaruh Audit Sektor Publik Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah .....	62
4.3.2	Audit Keuangan Secara Parsial Berpengaruh Terhadap Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah .....	64

4.3.3	Audit Kinerja Secara Parsial Berpengaruh Terhadap Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah .....	65
4.3.4	Audit Investigasi Secara Parsial Berpengaruh Terhadap Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah .....	67
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>70</b>
5.1	Kesimpulan .....	70
5.2	Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>72</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>74</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 : Operasional dan Variabel Penelitian .....	32
Table 3.2 Daftar Pilihan Kusioner .....	34
Table 3.3 Daftar Jumlah Populasi.....	35
Tabel 3.4 Koefisien Korelasi.....	39
Tabel 3.5 Jadwal Penelitian.....	42
Tabel 4.1. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	46
Tabel 4.2. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pendidikan.....	46
Tabel 4.3. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Umur .....	47
Tabel 4.4 Kriteria Interpretasi Skor .....	48
Tabel 4.5 Tanggapan Responden Variabel Audit Keuangan (X1) .....	49
Tabel 4.6 Tanggapan Responden Variabel Audit Kinerja (X2).....	50
Tabel 4.7 Tanggapan Responden Variabel Audit Investigasi (X3) .....	51
Tabel 4.8 Tanggapan Responden Variabel Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	52
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Audit Keuangan (X1) .....	53
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Audit Kinerja (X2).....	54
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Audit Investigasi (X3) .....	55
Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	
.....	56

Tabel 4.13 Hasil Pengujian Hipotesis dan Besarnya Pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y ..... 59

Tabel 4.14 Koefisien Jalur, Pengaruh Langsung, Pengaruh Total Audit variabel Sektor Publik (X) Terhadap Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y) ..... 60

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 2.1 kerangka pemikiran .....</b>	<b>28</b>
<b>Gambar 3.1 Pengaruh X ke Y .....</b>	<b>42</b>
<b>Gambar 4.1 struktur organisasi .....</b>	<b>45</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I. INSTUMEN PENELITIAN .....	74
LAMPIRAN 2. DATA ORDINAL .....	82
LAMPIRAN 3. DATA FREKUENSI.....	90
LAMPIRAN 4. UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS .....	96
LAMPIRAN 5. CORRELASI DAN t TABEL .....	100
<i>ABSTRACT</i> .....	102
ABSTRAK .....	103
BEBAS PLAGIASI .....	104
HASIL TURNITIN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
REKOMENDASI PENELITIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT BALASAN PENELITIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KURIKULUM VITAE .....	110

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemberian otonomi daerah mengacu pada pelimpahan wewenang dan keleluasaan (diskresi) kepada daerah untuk mengatur dan menggunakan sumber daya daerah secara efektif. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan penyelewengan, pendeklasian wewenang dan keleluasaan harus diikuti dengan pengawasan dan pengendalian yang ketat, serta evaluasi yang efektif. Pemerintah sebagai salah satu organisasi sector public tidak pernah luput dari tudungan sebagai sarang korupsi, kolusi, nepotisme, dan sumber kerugian negara. Organisasi pemerintah di sektor publik adalah lembaga yang menjalankan jalannya pemerintahan yang sumber legitimasinya disediakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan harus diimbangi dengan pemerintahan yang bersih.

Seiring dengan munculnya tuntutan publik terhadap organisasi sektor publik untuk menjaga kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan kegiatannya serta untuk menjamin akuntabilitas publik terhadap organisasi sektor publik, maka diperlukan audit terhadap organisasi sektor publik tersebut. Audit yang dilakukan tidak hanya terbatas pada audit keuangan dan kepatuhan, tetapi juga harus diperluas melalui audit kinerja organisasi sektor publik.

Pengawasan dilakukan oleh pihak di luar eksekutif (dalam hal ini DPRD dan masyarakat); pengendalian, berupa pengendalian internal dan pengendalian manajemen, berada di bawah kendali eksekutif (pemerintah darah) dan dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa strategi dijalankan dengan baik sehingga tujuan tercapai; sedangkan pemeriksaan (audit) dilakukan oleh badan yang kompeten dan independen untuk mengukur apakah kinerja eksekutif sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2001).

Audit pada organisasi sector publik sering didefinisikan sebagai suatu proses sistematik secara objektif untuk melakukan pengujian secara independen terhadap keakuratan dan kelengkapan informasi dari kegiatan dan kejadian ekonomi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Pemeriksaan sektor publik adalah kegiatan yang ditujukan kepada badan-badan yang memberikan jasa dan penyediaan barang yang pembbiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya, dengan tujuan untuk membandingkan kondisi yang ditemukan dengan kriteria yang ditetapkan.

Audit yang dilakukan di sektor publik pemerintah berbeda dengan yang dilakukan di sektor swasta. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan konteks kelembagaan dan hukum, di mana audit sektor publik pemerintah memiliki prosedur dan tanggung jawab yang berbeda dan peran yang lebih luas daripada audit sektor swasta (Wilopo, 2001).

Audit sektor publik bukan hanya memeriksa serta menilai kewajaran laporan keuangan sektor publik, tetapi juga menilai kepatuhan aparat pemerintahan terhadap undang-undang dan peraturan yang ada. Disamping itu, audit sektor publik juga memeriksa dan menilai sifat-sifat hemat (ekonomis), efisien serta keefektifan dari semua pekerjaan yang dilakukan. Dengan demikian, bila kualitas audit sector public rendah, akan mengakibatkan risiko tuntutan hukum (legitimasi) terhadap pejabat pemerintah dan akan muncul kecurangan, korupsi, kolusi serta berbagai ketidak benaran.

Pemeriksaan Sektor Publik adalah kegiatan yang ditujukan kepada badan-badan yang memberikan jasa dan penyediaan barang yang pemberiannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan Negara lainnya, dengan tujuan untuk membandingkan kondisi yang ditemukan dengan kriteria yang ditetapkan. Pemeriksaan Sektor Publik di Indonesia dikenal dengan istilah Pemeriksaan Keuangan Negara, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

Kemudian muncul pertanyaan apakah audit yang dilakukan oleh Lembaga-lembaga yang professional dapat membantu kinerja pemerintah dalam menciptakan hasil. Kemudian dalam hal menciptakan hasil, apakah pemerintah dapat menerapkan konsep ekonomis, efisien, dan efektif dalam sumber daya yang tersedia. Masyarakat tentu akan terus mengawasi kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan, apakah

dalam pelayanan tersebut sudah sesuai dengan yang diinginkan masyarakat ataukah belum.

Sejalan dengan itu, audit hadir untuk membantu pemerintah mengukur kinerja, yang sangat penting untuk menilai tanggung jawab organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Audit Sektor Publik bukan hanya sekedar pemeriksaan biasa, tetapi lebih dari itu, Audit Sektor Publik dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan yang diaudit telah memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum, peraturan perundangan undangan dan pengendalian internal dan bahwa operasi entitas sektor publik dilakukan dengan cara yang efisien, hemat biaya, dan efektif. Dalam keterbatasan yang ada, audit tetap perlu dilakukan untuk menciptakan akuntabilitas publik yang lebih transparan dan akuntabel.

Secara umum, ada tiga jenis audit dalam audit sektor publik, yaitu audit keuangan (*financial Audit*), audit investigasi (*Investigation audit*), dan audit kinerja (*performance audit*). Audit yang pertama adalah audit keuangan merupakan audit yang menjamin bahwa sistem akuntansi dan pengendalian keuangan berjalan secara efisien dan tepat serta transaksi keuangan diotorisasi serta dicatat secara benar. Audit yang kedua adalah Audit investigasi yang dimana audit ini merupakan proses mencari, menemukan, mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi bukti secara sistematis oleh pihak-pihak yang berkompeten dan independen untuk mengungkap fakta atau kejadian nyata. Sedangkan audit yang ketiga ialah audit kinerja yang merupakan

perluasan dari audit keuangan dan audit kepatuhan dalam hal tujuan dan prosedur. Audit kinerja berfokus pada pemeriksaan tindakan dan peristiwa ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Audit kinerja adalah suatu kegiatan atau proses sistematis dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, agar dapat melakukan penilaian independen terhadap ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam mencapai hasil yang diinginkan, peraturan dan undang-undang yang berlaku, serta kepatuhan terhadap kebijakan, menentukan kecukupan antara kinerja yang dicapai dengan kriteria yang telah ditentukan dan juga mengkomunikasikan hasilnya kepada pengguna laporan.

Berkaitan dengan adanya audit, pada tahun anggaran 2019 BPK melakukan audit yang dimana hasil dari audit tersebut menemukan banyak pegawai yang menjadi temuan BPK, sekitar 2000-an pegawai ditemukan perjalanan dinas (Perdis) yang tersebar di beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Hasil temuan itu adalah selisih perjalanan, kelebihan pembayaran dan juga ada yang bersamaan tanggal perjalanan dinasnya. Dengan adanya temuan BPK tersebut, berarti kinerja pegawai pegawai pemerintah masih relatif rendah.

Dari hasil survei awal peneliti dan juga wawancara yang dilakukan terhadap beberapa pegawai tentang adanya temuan BPK tersebut yang membenarkan adanya temuan tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa masih kurangnya kinerja pegawai pemerintah yang mengakibatkan banyaknya temuan-temuan yang bisa mengurangi kualitas kinerja pegawai.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh penerapan audit sektor publik yang meliputi: audit keuangan, audit investigasi dan audit kinerja secara Simultan berpengaruh terhadap kualitas kinerja pemerintah daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong.
2. Seberapa besar pengaruh audit keuangan secara Parsial berpengaruh terhadap kualitas kinerja pemerintah daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong.
3. Seberapa besar pengaruh audit kinerja secara Parsial berpengaruh terhadap kualitas kinerja pemerintah daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong.
4. Seberapa besar pengaruh audit investigasi secara Parsial berpengaruh terhadap kualitas kinerja pemerintah daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis serta memperoleh data berupa pengaruh penerapan Audit Sektor Publik, disamping itu untuk mengetahui seberapa besar indikator variabel audit sektor public berpengaruh terhadap Kualitas Kinerja Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong.

#### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh penerapan audit sektor publik yang meliputi audit keuangan, audit investigasi dan audit kinerja secara Simultan berpengaruh terhadap kualitas kinerja pemerintah daerah pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh audit keuangan secara Parsial berpengaruh terhadap kualitas kinerja pemerintah daerah pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Mouton.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh audit kinerja secara Parsial berpengaruh terhadap kualitas kinerja pemerintah daerah pada

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Parigi Moutong.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh audit investigasi secara Parsial berpengaruh terhadap kualitas kinerja pemerintah daerah pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat yaitu:

1. Bagi Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar dan tambahan pengetahuan maupun wawasan tentang bagaimana ruang lingkup dari Audit Sektor Publik yang diteliti serta untuk membandingkan kenyataan yang sebenarnya dengan teori-teori dari studi perkuliahan.
2. Bagi praktisi untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong secara ekonomis, efisien dan efektif.
3. Untuk akademisi dan penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya pada khususnya dibidang ilmu Audit Sektor Publik pada umumnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Pengertian Audit**

Indra Bastian (2007: 2-3) Audit adalah suatu proses sistematik dan objektif dari penyediaan dan pengevaluasian dari bukti-bukti yang berkaitan dengan pernyataan (*assertion*) tentang kegiatan ekonomi untuk memastikan derajat atau tingkat hubungan antara pernyataan tersebut dengan bukti yang ada serta mengkomunikasikan hasil yang diperoleh tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Halim (2001 : 1) Audit adalah suatu proses sistematik untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan.

Sunarto (2003 : 3) Audit adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Puradiredja dkk (1998) Audit proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan-kegiatan ekonomi, dengan tujuan

untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Joel siegel dkk (1994: 34-35) Auditing adalah pemeriksaan catatan akuntansi klien seorang akuntan publik berijazah independen dan pendapat pemeriksaan. Auditor harus mengikuti prosedur pemeriksaan yang diterima secara umum. Dokumen sebenarnya diperiksa untuk mendapat keabsahan transaksi yang kuat. Oleh karena itu hal yang perlu diperhatikan adalah perlu penilaian yang hati-hati terhadap pengawasan internal.Simamora (2002:4) Auditing adalah proses yang sistematis pencarian dan pengevaluasian secara objektif terhadap bukti-bukti mengenai asersi peristiwa dan tindakan ekonomi untuk meyakinkan ukuran kesesuaian antara asersi tersebut dengan criteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa audit merupakan suatu kegiatan yang sistematis dan objektif untuk mengevaluasi kegiatan atau kejadian-kejadian ekonomi yang dilengkapi dengan bukti-bukti dan juga asersi-asersi guna untuk menyesuaikan antara pernyataan dengan kriteria-kriteria yang ada agar dapat mengkomunikasikan atau menyampaikan hasil yang diperoleh kepada para pengguna yang memiliki kepentingan.

## **2.1.2 Pengertian Audit Sektor Publik**

Audit dalam organisasi sektor publik telah menjadi isu yang paling penting untuk mencapai tata kelola yang baik. Audit adalah penyelidikan yang independen dari beberapa kegiatan tertentu. Mekanisme pemeriksaan merupakan mekanisme yang dapat mengubah arti tanggung jawab dalam pengelolaan sektor pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau lembaga pengelolaan kekayaan negara lainnya. Audit terhadap sektor publik sangat penting dilakukan hal ini merupakan bentuk tanggung jawab setor publik (pemerintah pusat dan daerah) untuk mempertanggungjawabkan dana yang telah digunakan oleh instansi sehingga dapat diketahui pemanfaatan dana tersebut dilaksanakan sesuai prosedur dan standar atau tidak, (Anis Ranchman Utary Dan Muhammad Iqbal. 2014:9)

Menurut I Gusti Agung Rai (2008:29) Pemeriksaan sektor publik adalah kegiatan yang ditujukan kepada badan usaha yang menyediakan jasa dan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya, dengan tujuan untuk mengkonfrontir kondisi yang ditemukan dengan kriteria yang telah ditetapkan.. Menurut (Wilopo, 2001). Audit yang dilakukan di sektor publik pemerintah berbeda dengan yang dilakukan di sektor swasta. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan konteks kelembagaan dan hukum, di mana audit sektor publik pemerintah memiliki prosedur dan tanggung jawab yang berbeda dan peran yang lebih luas daripada audit sektor swasta.

Audit sektor publik adalah audit yang dilakukan terhadap pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat, serta BUMN dan BUMD lainnya yang sumber pendanaannya berasal dari pajak publik. Audit sektor publik ini dilakukan untuk memverifikasi kebenaran laporan yang dibuat dalam kondisi nyata yang terjadi jika instansi pemerintah telah menjalankan fungsinya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Tujuan audit sektor publik

### **2.1.3 Jenis-Jenis Audit Sektor Publik**

Dalam setiap audit, menetapkan tujuan untuk menentukan jenis audit yang akan dilakukan dan standar auditing yang harus diikuti oleh auditor merupakan kewajiban yang harus dilakukan sejak awal. Audit dapat memiliki tujuan yang sama atau kombinasi yang terdiri dari audit keuangan dan audit kinerja, tetapi memiliki tujuan yang terbatas juga dalam berbagai aspek dari masing-masing jenis audit di atas. Seperti ketika melakukan audit kontrak kontraktor atau bantuan pemerintah dari yayasan atau badan hukum lainnya, tujuan audit umumnya mencakup tujuan audit keuangan atau tujuan audit kinerja. Audit ini sering disebut audit kontrak atau audit bantuan, baik audit atas penerapan sistem pengendalian internal, terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, atau pada sistem berbasis komputer.

Dalam setiap audit, menetapkan tujuan untuk menentukan jenis audit yang akan dilakukan dan standar audit yang harus diikuti oleh auditor merupakan auditor. Audit dapat memiliki kombinasi tujuan untuk audit keuangan dan audit operasional, atau dapat memiliki tujuan yang terbatas pada beberapa aspek dari masing-masing jenis audit di atas.

Menurut Indra Bastian audit sektor publik terbagi menjadi beberapa jenis yaitu:

### **1. Audit Keuangan**

Audit keuangan atau audit laporan keuangan adalah penilaian atau penilaian terhadap suatu entitas (organisasi, perusahaan atau lembaga) untuk menghasilkan opini independen atau pihak ketiga atas laporan keuangan yang akurat, lengkap, relevan, wajar, dan tentunya, sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku.

Audit atas laporan keuangan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memverifikasi bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini membantu untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hubungan antara definisi audit keuangan dan definisi audit secara umum bukanlah suatu kebetulan. Konsep definisi audit umumnya dibangun melalui penalaran induktif dari karakteristik audit yang

ada. Menurut Mulyadi (2014: 30-32) audit keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam audit laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum hasil auditing terhadap laporan keuangan tersebut disajikan dalam bentuk tertulis berupa laporan audit, laporan audit ini diberikan kepada para pemakai informasi keuangan.

Tujuan pengujian laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat yang jujur tentang posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan auditor adalah sarana untuk menyatakan pendapat auditor dalam kondisi tertentu, menyangkal pendapat. Audit keuangan meliputi audit atas laporan keuangan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan keuangan. Audit atas laporan keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas yang diaudit menyajikan secara memadai posisi keuangan, hasil operasi atau operasi dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

## **2. Audit Kinerja**

Mardiasmo (2002: 179-180) Audit kinerja adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, agar dapat membuat penilaian independen atas ekonomi dan efisiensi operasional, efektivitas dalam

mencapai hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kecukupan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang telah ditentukan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengguna laporan.

Audit kinerja adalah pemeriksaan secara objektif dan sistemtik terhadap berbagai jenis bukti untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja suatu entitas atau program/kegiatan pemerintah yang diaudit. Dengan audit kinerja, tingkat akuntabilitas pemerintah dalam proses pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab akan meningkat, sehingga mendorong pengawasan dan kemudian dapat diambil suatu tindakan pengoreksian.

Manfaat utama dari audit kinerja yaitu:

1. Peningkatan kinerja

Audit kinerja dapat meningkatkan kinerja suatu entitas yang diaudit dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi permasalahan dan alternatif penyelesaian;
- b. Mengidentifikasi sebab-sebab actual (tidak hanya gejala atau perkiraan-perkiraan) dan suatu permasalahan yang dapat diatasi oleh kebijakan manajemen atau tindakan lainnya;

- c. Mengidentifikasi peluang atau kemungkinan untuk mengatasi keborosan atau ketidakefisienan;
  - d. Mengidentifikasi kriteria untuk menilai pencapaian tujuan organisasi;
  - e. Melakukan evaluasi atas system pengendalian internal;
  - f. Menyediakan jalur komunikasi antara tataran
  - g. Melaporkan ketidakberesan;
2. Peningkatan akuntabilitas public

Pada sektor publik, audit kinerja dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas, berupa perbaikan pertanggungjawaban manajemen kepada lembaga perwakilan; pengembangan bentuk-bentuk laporan akuntabilitas; perbaikan indikator kinerja; perbaikan perbandingan kinerja antara organisasi sejenis yang periksa; serta penyajian informasi yang lebih jelas dan informatif.

### **3. Audit Infestigasi**

Audit investigatif adalah kegiatan pemeriksaan dengan ruang lingkup tertentu yang tidak terbatas pada jangka waktu, dan lebih spesifik pada bidang tanggung jawab yang diduga mengandung inefisiensi atau bukti penyalahgunaan wewenang, dengan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi untuk diikuti. tergantung pada tingkat penyalahgunaan wewenang yang ditemukan. Tujuan pemeriksaan investigatif adalah untuk mencari kesimpulan lebih lanjut atas temuan pemeriksaan sebelumnya, serta melakukan pemeriksaan untuk membuktikan kebenarannya berdasarkan pengaduan atau informasi dari

masyarakat. Tanggung jawab untuk melakukan audit investigasi terletak pada badan audit atau unit pengawasan. Prosedur dan teknik audit investigasi mengacu pada standar audit dan penyesuaian dilakukan sesuai dengan keadaan yang bersangkutan. Hasil laporan audit investigasi menetapkan siapa yang terlibat atau bertanggung jawab dan ditandatangani oleh kepala lembaga/satuan audit.

Dalam audit investigatif, seorang auditor memulai audit dengan dugaan/indikasi kemungkinan kecurangan dan kejahatan yang akan diidentifikasi dan terungkap melalui audit yang akan dilakukan. Kondisi tersebut misalnya akan mempengaruhi siapa yang akan diwawancara terlebih dahulu atau dokumen mana yang harus dikumpulkan terlebih dahulu. Selain itu, dalam audit investigasi, jika diizinkan, auditor dapat menggunakan prosedur dan teknik yang biasa digunakan dalam investigasi dan investigasi kriminal, seperti pengintaian dan penggeledahan.

Tujuan audit investigasi adalah mengadakan temuan lebih lanjut atas temuan audit sebelumnya, serta melaksanakan audit untuk membuktikan kebenaran berdasarkan pengaduan atau informasi masyarakat. Tanggung jawab pelaksanaan audit investigasi terletak pada lembaga audit atau satuan pengawas. Adapun sumber informasi audit investigasi adalah:

- a. Pengembangan temuan audit sebelumnya,
- b. Adanya pengaduan dari masyarakat,

- c. Adanya permintaan dari dewan komisaris atau DPR untuk melakukan audit, misalnya karena adanya dugaan manajemen atau pejabat yang melakukan penyelewengan.

#### **2.1.4 Berbagai Elemen dan Masalah Utama Audit**

##### **1. Tujuan Audit Sektor Publik**

Audit sektor publik adalah suatu jasa penyelidikan bagi masyarakat atas organisasi sektor publik dan politikus yang mereka bayai. Hal ini dapat memberikan keuntungan yang lebih besar lagi karena janji yang mereka buat dapat diperiksa secara profesional oleh pihak independen. Legislatif mengesahkan berbagai tingkatan dari pengawasan dan pemeriksaan bagi kebanyakan sektor publik. Akan Tetapi, hukum tidak membahas lebih khusus mengenai standar audit. Kebanyakan audit sektor publik hanya mencakup intervensi atau audit organisasi yang berkaitan dengan hukum yang terdiri atas standar dan batasan yang tercakup dalam bagian akuntansi.

Kegiatan audit sektor publik meliputi perencanaan, pengendalian, pengumpulan data, pemberian opini, dan pelaporan. Permasalahan utama dalam proses audit adalah memberikan saran yang jelas dalam pelaksanaannya. Tujuan dari audit sektor publik diperkuat dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang ini menyatakan bahwa pemeriksaan mempunyai fungsi untuk

mendukung keberhasilan pengelolaan keuangan negara secara teratur dan taat pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada.

## **2. Objek Audit Sektor Publik**

Agar proses suatu audit dapat menjadi suatu bagian yang dapat dipahami, maka definisi suatu objek audit sektor publik sangat diperlukan. Auditor sektor publik sangat mempunyai kepentingan dengan aktivitas entitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini merupakan perhatian yang utama dari auditor sektor publik selama pelaksanaan pekerjaan audit.

Objek audit lainnya adalah pengorganisasian entitas. Pengorganisasian di sini meliputi dua aspek, yaitu bagaimana hubungan internal dan hubungan eksternal yang terdapat dalam suatu organisasi. Dalam hubungan internal suatu organisasi atau dapat juga disebut sebagai struktur organisasi juga menjadi perhatian utama auditor. Struktur organisasi adalah divisi kerja dalam organisasi dan orang-orang yang melakukan pekerjaan dalam divisi kerja tersebut. Sedangkan aspek hubungan eksternal, auditor harus familiar dengan klien-klien organisasi. Lebih dari itu, auditor harus mengetahui perbedaan dan persamaan antara entitas yang menjadi kliennya dengan entitas-entitas lainnya. Auditor juga harus mengetahui aspek-aspek yang menjadi keunikan organisasi.

## **3. Masalah-masalah Utama Audit Sektor Publik**

### **a. Prosedur Auditing**

Empat tipe prosedur audit meliputi: inspeksi, observasi, penyelidikan dan konfirmasi. Namun, keempat tipe tersebut hanyalah merupakan contoh, dan sehingga perlu diingat bahwa tidak terdapat satupun nama dan deskripsi prosedur auditing yang bersifat mutlak dan benar

**b. Peristiwa Kemudian dan Kaitannya Dengan Prosedur Auditing**

Prosedur audit bukanlah suatu peristiwa, tetapi lebih dari pada sebagai alat yang digunakan untuk mengidentifikasi peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian ini terdiri dari data akuntansi yang bersifat pokok dan seluruh kolaborasi informasi yang tersedia untuk auditor.

**c. Pernyataan Laporan Keuangan**

Pernyataan merupakan representasi pihak manajemen yang terdapat dalam laporan keuangan, yang meliputi pernyataan mengenai posisi keuangan dan kegiatan operasi organisasi. Kategori-kategori dari pernyataan terdiri atas:

- a) Eksistensi
- b) Kelengkapan
- c) Hak dan kewajiban
- d) Penilaian atau alokasi
- e) Penyajian dan pengungkapan

Auditor perlu untuk mengungkapkan peristiwa kemudian yang mendukung masing-masing pernyataan yang bersifat material untuk seluruh komponen laporan keuangan. Suatu komponen keuangan mungkin dapat berupa rekening neraca atau

sekelompok rekening neraca, suatu kelompok transaksi dan juga kategori-kategori pernyataan secara luas yang meliputi transaksi dan neraca.

### **2.1.5 Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah**

Greenbrg (dalam Mangkunegara, 2001 : 67) mendefinisian kinerja sebagai hasil kerja atau prestasi kerja dapat diketahui melalui perbandingan antara totalitas pengeluaran pada waktu tertentu dibagi totalitas masukan selama periode tertentu.

Menurut Gary Desseler, (1992 ; 476) menyatakan bahwa “ kualitas kerja atau disebut kualitas kehidupan kerja adalah kondisi dimana para pegawai dapat memenuhi kebutuhan mereka yang penting dengan bekerja dalam organisasi. Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu orgaisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan yang berkaitan kuat terhadap tujuan-tujuan strategi organisasi.

Kualitas kinerja merupakan suatu hasil yang dapat diukur dengan efektifitas dan efisiensi kerja yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi secara memadai dan efisien. Kualitas kinerja merupakan wujud perilaku dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan dan sesuai dengan harapan yang telah ditentukan.

Sementara itu Mustopadidjaja (2002) mengemukakan bahwa bagi organisasi pemerintahan, kinerja pemerintah yang baik (good government performance) bukan

hanya memerlukan kebijakan yang baik (good policy), tetapi juga sistem dan proses implementasi kebijakan yang baik (good policy implementation system and process); dan kedua hal terakhir itu memerlukan sistem administrasi pemerintah negara yang baik (good public administration system) yang mengharuskan adanya sumberdaya manusia yang baik dan diindahkannya prinsip “the right men and women and the right places”. Kebijakan yang baik tidak pula menghasilkan kinerja yang baik apabila sistem dan proses pelaksanaannya tidak baik, dan semuanya itu juga tergantung pada kompetensi sumberdaya manusianya yang bertindak dalam sistem dan proses kebijakan.

Kualitas kerja merujuk pada kualitas sumber daya manusia (Matutina,2001:205), kualitas sumber daya manusia mengacu pada :

1. Pengetahuan (Knowledge) yaitu kapabilitas yang dimiliki karyawan yang lebih mengarah pada intelejensi dan daya fikir serta kemampuan ilmu yang luas yang dimiliki karyawan.
2. Keterampilan (Skill), kemampuan dan penguasaan teknis operasional di bidang khusus yang dimiliki karyawan.
3. Abilities yaitu kemampuan yang terbentuk dari sejumlah kompetensi yang dimiliki seorang karyawan yang mencakup loyalitas, kedisiplinan, kerjasama dan tanggung jawab.

Kinerja pemerintah diartikan sebagai suatu hasil kegiatan dan program pemerintah yang harus atau telah dicapai dalam kaitannya dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (PP Nomor 8 Tahun 2006). Menurut Nordiawan (2010), kinerja pemerintah tidak dapat dilihat hanya dari sisi input dan output saja, tetapi juga dari sisi outcome, manfaat dan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat.

Peran kinerja pemerintah dalam lingkup kajian organisasi adalah secara makro, tujuan, cita-cita, dan harapan suatu organisasi yang telah diusahakan pencapaiannya dan perwujudannya melalui organisasi tersebut. Bahwa sekelompok orang yang mempunyai kesetiaan pada kepentingan, dan juga pencapaiannya diusahakan melalui organisasi, sedangkan pada tingkat individu, berbagai tujuan, keinginan, cita-cita, harapan, dan kebutuhannya hanya bisa tersalurkan, terpenuhi, dan memuaskan dengan memanfaatkan jalur organisasional. Dikatakan sedemikian maksudnya adalah karena adanya hubungan ketergantungan antara manusia bersama organisasi dalam arti bahwa manusia tidak mungkin lagi mencapai berbagai tujuannya tanpa menggunakan jalur organisasi dan sebagainya.

### **2.1.6 Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah**

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat untuk menilai keberhasilan organisasi, yang dalam konteks organisasi sektor publik akan dipergunakan untuk mendapatkan dukungan dan legitimasi dari publik. Masyarakat akan menilai

kesuksesan organisasi lewat kemampuan organisasi dalam memberikan layanan publik yang lebih murah dan berkualitas. Sehingga pengukuran kinerja benar-benar sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan pimpinan dalam menciptakan layanan publik yang lebih baik.

Pengukuran kinerja memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas, untuk menetapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang didalamnya terdapat indikator kinerja dan target kinerja, pelaporan kinerja dan mekanisme *reward and punishment*. Indikator pengukuran kinerja yang baik mempunyai karakteristik *relevant, unambiguous, cost-effective, dan simple*, serta berfungsi sebagai sinyal atau alaram yang menunjukan bahwa terdapat masalah yang memerlukan tindakan manajemen dan investigasi lebih lanjut.

Menurut (Mardiasmo, 2009) bentuk pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik membentuk suatu system yang memiliki tujuan untuk mendukung manajemen public mengambil keputusan strategi melalui informasi keuangan dan informasi non keuangan. Bentuk pengukuran kinerja pada organisasi sector public dapat menjadi alat pengendalian organisasi tersebut karena memutuskan system penghargaan dan hukuman. Dasar dilakukannya pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik adalah sebagai wujud pertanggungjawaban organisasi kepada publik dan membantu memperbaiki kinerja pada organisasi pemerintahan serta agar alokasi sumberdaya tepat sasaran.

Sistem pengukuran kinerja mempunyai tujuan diantaranya:

- a. Komunikasi tentang strategi yang lebih baik

- b. Menyeimbangkan pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan
- c. Mengakomodasi pemahaman kepentingan manajemen dari level atas sampai manajemen level bawah

Berdasarkan pendekatan individu untuk mencapai kepuasan dan kemampuan rasional. Informasi yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam organisasi sektor publik adalah:

- a. Informasi keuangan, yang dibuat dengan mengukur dan menganalisis variasi kinerja aktual dengan variasi kinerja yang dianggarkan
- b. Informasi non-keuangan, yang diperoleh dengan meningkatkan kepercayaan terhadap kualitas kinerja sektor publik denganmelalui penerapan Balanced Scorecard

Dalam pengukuran kinerja terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah yaitu:

1. Sistem perencanaan dan pengendalian

Ini mencakup proses, prosedur dan struktur yang memberikan jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan ke semua bagian organisasi menggunakan rantai komando yang jelas berdasarkan spesifikasi tugas dan peran utama, wewenang dan tanggung jawab.

2. Spesifikasi dan standarisasi

Kinerja suatu kegiatan, program dan organisasi diukur dengan menggunakan spesifikasi teknis rinci untuk memberikan jaminan bahwa spesifikasi teknis tersebut digunakan sebagai standar evaluasi.

### 3. Kompetensi teknis dan profesionalisme

Untuk memberikan jaminan terpenuhinya spesifikasi teknis dan standarisasi yang ditetapkan maka diperlukan personil yang memiliki kompetensi teknis dan professional dalam bekerja.

### 4. Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar

Mekanisme ekonomi berkaitan dengan pemberian penghargaan dan hukuman yang bersifat financial, sedangkan mekanisme pasar terkait dengan peggunaan sumber daya yang menjamin terpenuhinya *Value For Money*.

### 5. Mekanisme sumber daya manusia

Pemerintah perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk memotivasi stafnya untuk memperbaiki kinerja personal dan organisasi.

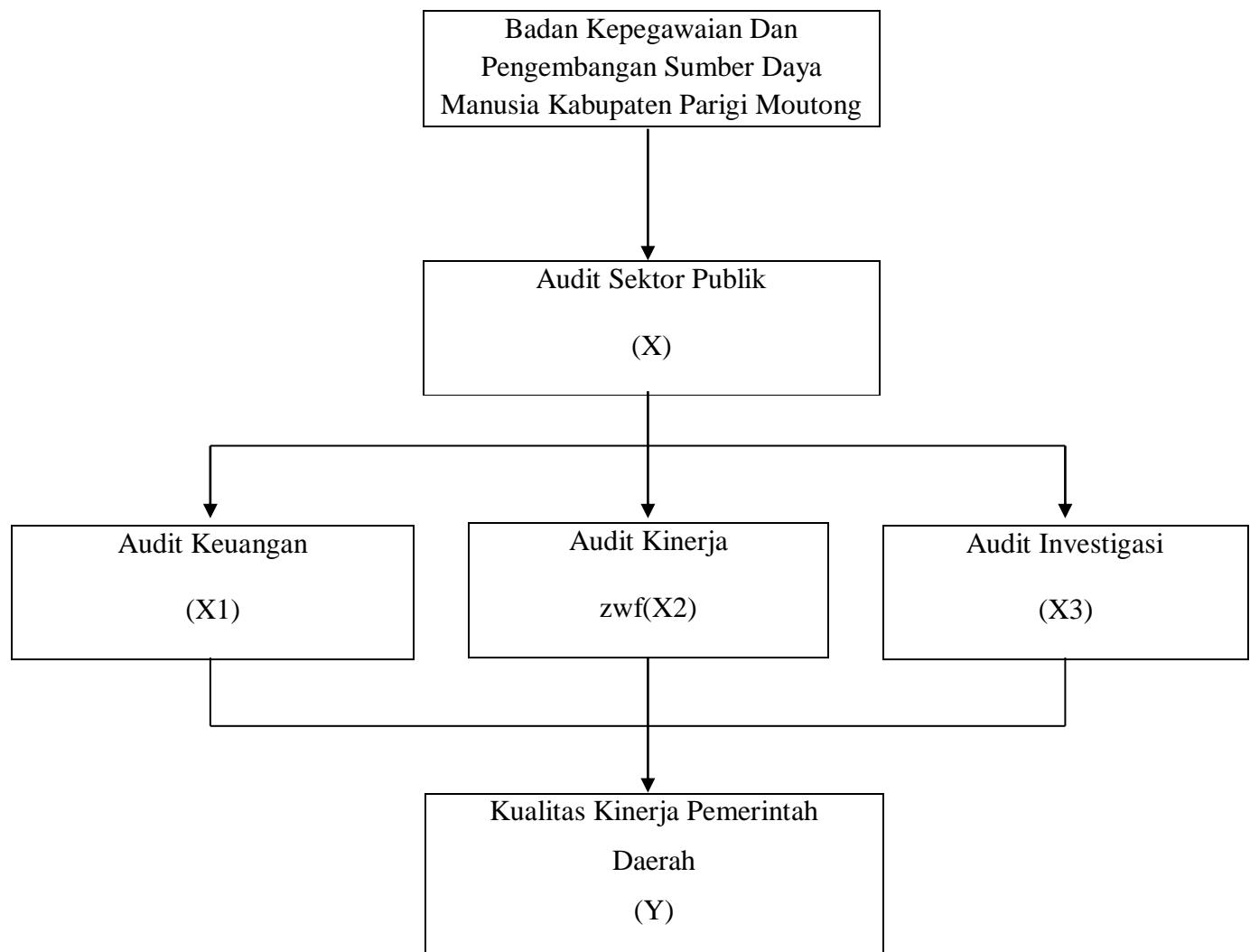
Menurut Indra Bastian (2006 : 267), indicator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan meperhitungkan indicator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*).

1. Indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indicator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan perundang-undangan, an sebagainya.

2. Indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau nonfisik.
3. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang menncerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
4. Indikator manfaat (*benefits*) adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative terhadap setiap tingkat Indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Dalam melakukan penelitian ini menitik beratkan pada pengukuran besarnya pengaruh Audit Sektor Publik terhadap kualitas kinerja pegawai pada Kantor Bupati Parigi Moutong. Sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, maka kerangka pemikiran pada penelitian ini digambarkan seperti berikut:



**Gambar 2.1 kerangka pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah tergambaran di atas, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

1. Audit sektor publik meliputi : audit keuangan (X1), audit kinerja (X2), dan audit investigasi (X3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas kinerja pemerintah daerah pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong.
2. Audit keuangan (X1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas kinerja pemerintah daerah pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong.
3. Audit kinerja (X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas kinerja pemerintah daerah pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong.
4. Audit investigasi (X3) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas kinerja pemerintah daerah pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong.

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Audit Sektor Publik dan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah. Lokasi dari penelitian ini yaitu Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong.

#### **3.2 Metode Penelitian**

##### **3.2.1 Metode Penelitian Yang Digunakan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010:82), Metode Penelitian Kuantitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang didasarkan pada filosofi positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, metode penelitian berupa angka-angka dan analisis melalui statistik. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei, dimana penelitian survei digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dan menguji hipotesis. Penelitian ini mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data utama.

Menurut Riduwan (2008:49), menyatakan bahwa penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang diteliti adalah data dari sampel yang diambil dari suatu populasi tersebut. Penelitian Survei sering menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data utama. Sedangkan

menurut Sugiyono (2010:82) metode survei adalah metode survei yang dilakukan oleh populasi besar atau kecil, tetapi data yang diteliti adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut dan hubungan antar variabel-variabel sosiologi maupun psikologi.

Informasi dari sebagian populasi dikumpulkan langsung dari tempat kejadian secara empiris, dengan tujuan untuk mengetahui pendapat dari sebagian populasi tentang objek yang sementara diteliti, dimana unit analisisnya adalah individu-individu di wilayah objek penelitian, semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk memilih.

### **3.2.2 Operasional Variabel**

Untuk mengetahui data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka pertama-tama perlu mengaplikasikan variabel-variabel yang berhubungan. Tugiman (2006:11) menjelaskan bahwa variabel adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel bebas (dependent variabel) dan variabel tidak bebas (independent variabel)

#### **1. Variabel Independent (X)**

Menurut I Gusti Agung Rai (2008:29) Audit sektor publik adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembayarannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dengan kriteria yang ditetapkan.

## 2. Variabel Dependen (Y)

Kinerja Pemerintah Daerah adalah hasil atau pencapaian kegiatan atau program yang telah dianggarkan oleh suatu pemerintah dalam jangka waktu tertentu.

Kinerja pemerintah merupakan cerminan keberhasilan suatu pemerintahan dalam mengelola pemerintahannya selama periode tertentu.

**Tabel 3.1 : Operasional dan Variabel Penelitian**

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala
Audit Sektor Publik (X)	Audit Keuangan (X1)	1. Menghasilkan laporan keuangan yang akurat 2. Menghasilkan laporan keuangan yang lengkap 3. Menghasilkan laporan keuangan yang relevan 4. Menghasilkan laporan keuangan yang wajar 5. Menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku	Ordinal
	Audit Kinerja (X2)	1. Menghasilkan peningkatan ekonomi 2. Menghasilkan peningkatan efisiensi kinerja 3. Menghasilkan peningkatan akuntabilitas pemerintah	Ordinal

		4. Menghasilkan pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab	
	Audit Investigasi (X3)	1. Menghasilkan proses mencari penyimpangan atau kecurangan 2. Menghasilkan proses menemukan penyimpangan atau kecurangan 3. Menghasilkan pengumpulan bukti penyimpangan atau kecurangan 4. Menghasilkan tahapan pelaporan audit	Ordinal

Sumber: Indra bastian (2018 : 17-20)

Variable	Indikator	Skala
Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	1. Masukan ( <i>Inputs</i> ) 2. Keluaran ( <i>Outputs</i> ) 3. Hasil ( <i>Outcomes</i> ) 4. Manfaat ( <i>Benefits</i> ) 5. Dampak ( <i>Impacts</i> )	Ordinal

Sumber : Mahmudi (2005: 97)

Untuk melakukan tes pada masing-masing variabel yaitu variabel X yang terdiri dari Audit Keuangan (X1), Audit Kinerja (X2), dan Audit Investigasi (X3), serta Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y), maka akan diukur dengan memakai instrument kuisioner dengan skala likert.

Menurut Riduwan (2010: 86). Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Dengan menggunakan teknik skala likert dalam penelitian ini memberikan nilai skor pada item jawaban. Pemberian skor untuk setiap jawaban dari setiap pertanyaan yang diberikan kepada responden penelitian ini, maka akan mengacu kepada pernyataan. Sugiyono (2011 : 86-87) menyatakan bahwa: jawaban dari setiap instrument yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai dengan sangat negative yang dapat berupa kata-kata. Kuisisioner disusun dengan menyiapkan 5 (lima) pilihan yakni: sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Setiap pilihan akan diberikan bobot nilai sebagai berikut:

**Table 3.2 Daftar Pilihan Kuisisioner**

<b>Pilihan</b>	<b>Bobot</b>
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Riduwan (2010 : 86)

### **3.2.3 Populasi dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Sugiyono (2012:81) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari: objek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Oleh karena itu, populasi bukan hanya manusia, melainkan benda dan benda alam lainnya.

Populasi juga bukan sekedar jumlah ojek/subyek yang diteliti, tetapi meliputi semua ciri/sifat yang dimiliki oleh subyek dan obyek.

Dengan demikian, populasi merupakan suatu sumber penyimpulan terhadap suatu fenomena. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong yang berjumlah 55 orang yang terdiri dari :

**Table 3.3 Daftar Jumlah Populasi**

No	Bagian	Jumlah
1	Kepala	1 Orang
2	Sekretaris	1 Orang
3	Sub. Bagian Perencanaan Program Dan Kepegawaian	1 Orang
4	Sub. Bagian Keuangan Dan Aset	1 Orang
5	Analisis Kepegawaian	1 Orang
6	BIDANG PENGADAAN INFORMASI DAN KINERJA APARATUR	2 Orang
7	Sub. Bidang Dan Pengembangan Karir	5 Orang
8	Sub. Bidang Data Dan Informasi Kepegawaian	5 Orang
9	Sub. Bidang Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 Orang
10	BIDANG MUTASI DISIPLIN DAN PENGHARGAAN	2 Orang
11	Sub. Bidang Mutasi Dan Pensiun	4 Orang
12	Sub. Bidang Kepangkatan	5 Orang
13	Sub. Bidang Disiplin Dan Penghargaan	5 Orang
14	BIDANG PENGEMBANGAN DAN KOMPETENSI APARATUR	2 Orang
15	Sub. Bidang Diklat Perjenjangan Dan Sertifikasi	5 Orang
16	Sub. Bidang Diklat Teknis Fungsional	5 Orang

17	Sub. Bidang Pengembangan Kompetensi	5 Orang
	Jumlah	55 Orang

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

## 2. Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2012:81) mengemukakan sampel adalah Sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan Arikunto dalam Riduwan (2007:56) mengemukakan Sampel adalah bagian dari populasi (Sebagian atau mewakili populasi yang diteliti). Kemudian Riduwan (2007:76) mengemukakan bahwa apabila sampel kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan peneliti populasi. Oleh karena itu, berkaitan dengan jumlah populasi dan sampel yang dimaksud, populasi dari penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong yang berjumlah 55 pegawai. Berkaitan dengan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 55 pegawai yang ada pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong.

### 3.2.4 Sumber dan Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang menyediakan data secara langsung untuk pengumpulan data. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari responden yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data melalui penyebaran angket atau wawancara. Untuk memperoleh data primer yang merupakan pengumpulan data yang

diperoleh secara langsung dari Kantor Bupati Kabupaten Parigi Moutong digunakan metode penelitian lapangan dengan Teknik :

- a) Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan peninjauan langsung ke lokasi penelitian.
- b) Wawancara, Teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan agar mendapatkan keterangan-keterangan dan informasi kepada pimpinan dan pegawai pada Kantor Bupati Kabupaten Parigi moutong.
- c) Koesioner, yaitu Teknik pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan terstruktur yang ditujukan kepada responden.
- d) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku, jurnal ilmiah, guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian.

Data sekunder berupa data dan informasi penunjang yang didapat dan diolah oleh peneliti dari sumber internal yaitu Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Parigi Moutong. Dan dari sumber eksternal lain yang relevan, yang diperoleh melalui literatur, jurnal, serta publikasi hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian. Penelitian kepustakaan diperlukan untuk mendapatkan data sekunder untuk melengkapi data primer yang ada, data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal dan buku.

### **3.2.5 Prosedur Pengujian Instrumen Penelitian**

Agar mendapatkan data yang baik dalam arti mendeteksi kenyataan (obyektif) sudah pasti diperlukan suatu instrument atau alat pengumpulan data yang valid dan

andal (reliable). Dan agar dapat meyakini bahwa instrument atau alat ukur yang valid dan andal, maka instrument tersebut sebelum digunakan harus diuji validitas dan reliabilitasnya sehingga apabila digunakan akan menhasilkan data yang obyektif.

### 1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2005:109) menyatakan bahwa hasil penelitian yang valid, bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Instrument yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Arikunto (2001:219) Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen yang bersangkutan mampu mengukur apa yang diukur.

Menurut masrun yang dikutip Sugiyono (2008:106) menyatakan item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor total) dan korelasinya tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Uji validitas dilakukan dengan mengorelasikan masing-masing pernyataan dengan jumlah skor untuk masing-masing variabel, selanjutnya memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi.

Untuk pengujian validitas peneliti menggunakan rumus korelasi seperti yang dikemukakan oleh *pearson* yang dikenal dengan rumus korelasi *Pearson Product Moment* (PPM) sebagai berikut :

$$r_{XY} = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n\sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n\sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Dimana :

$r$  = angka korelasi

$X$  = skor pertanyaan (ke-n) variabel X

$Y$  = skor pertanyaan (ke-n) variabel Y

$xy$  = skor pertanyaan dikali total pertanyaan

*kriteria pengujian untuk taraf nyata  $\alpha = 0,05$ . Maka hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima jika  $t_{(1 - \frac{1}{2} \alpha)} < t < t_{(1 - \frac{1}{2} \alpha)}$  di mana distribusi T yang digunakan mempunyai dk = (n-2) dalam hal lainnya  $H_0$  ditolak dan rumus yang digunakan yaitu :*

$$= \frac{r\sqrt{N-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

$t$  = test

$r$  = korelasi antara variabel X dan Y

$N$  = jumlah sampel

**Tabel 3.4 Koefisien Korelasi**

R	Keterangan
0,800 – 1,000	Sangat tinggi
0,600 – 0,799	Tinggi
0,400 – 0,599	Cukup tinggi
0,200 – 0,399	Rendah
0,000 – 0,199	Sangat rendah

Sumber : Riduan (2006:220)

## 2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrument yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrument yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya benar-benar sesuai dengan kenyataannya, maka meskipun berulang kali diambil, maka akan tetap sama. Untuk menghitung uji reliabilitas, peneliti menggunakan rumus *alpha Cronbach* menurut Ghazali (2005:45) dengan rumus sebagai berikut:

$$a = \left( \frac{k}{k - 1} \right) \left( 1 - \frac{\sum s_i^2}{s^2} \right)$$

Keterangan :

K = jumlah instrument pertanyaan

$\sum s_i^2$  = jumlah varians dalam setiap instrument

S = varians keseluruhan instrument

Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai cronbach alpha  $> 0,60$  (Ghazali, 2005 : 46). Semakin nilai alphanya mendekati satu maka nilai reliabilitas datanya semakin terpercaya.

### 3.2.6 Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda, dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah

a : Konstanta

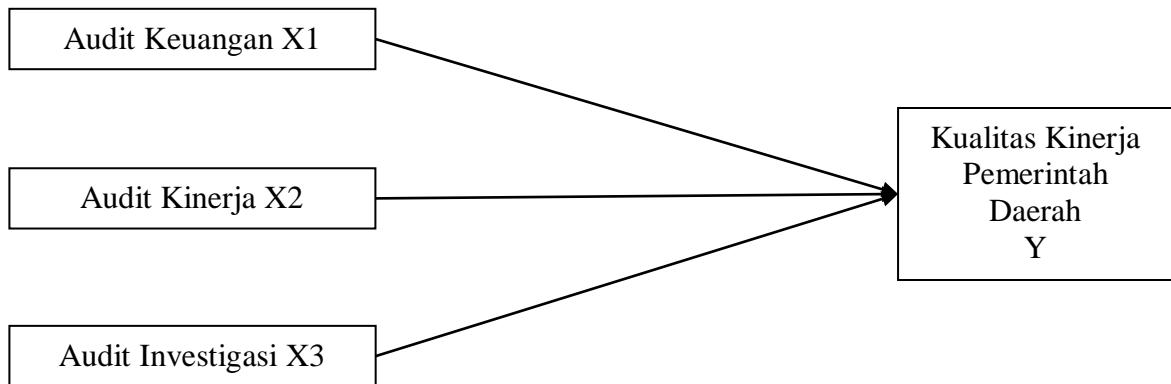
b1-b3 : koefisien regresi

X1 : Audit Keuangan

X2 : Audit Kinerja

X3 : Audit Investigasi

e : error term



**Gambar 3.1 Pengaruh X ke Y**

### 3.2.7 Jadwal Penelitian

### Tabel 3.5 Jadwal Penelitian

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Lokasi Penelitian**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong yang bertempat di Masigi, Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah berdiri sejak didirikannya Kabupaten Parigi Moutong Pada tanggal 10 april 2002. DPR RI mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185.

##### **4.1.2 Tugas dan Fungsi**

###### **1. Tugas**

###### **Pasal 88**

Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan SDM.

###### **2. Fungsi**

###### **Pasal 89**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 88, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- d. Pembinaan Teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4.1.3 Visi dan Misi**

##### **1. Visi**

“Terwujudnya Aparatur Yang Profesional Dan Manajemen Kepegawaian Yang Baik”

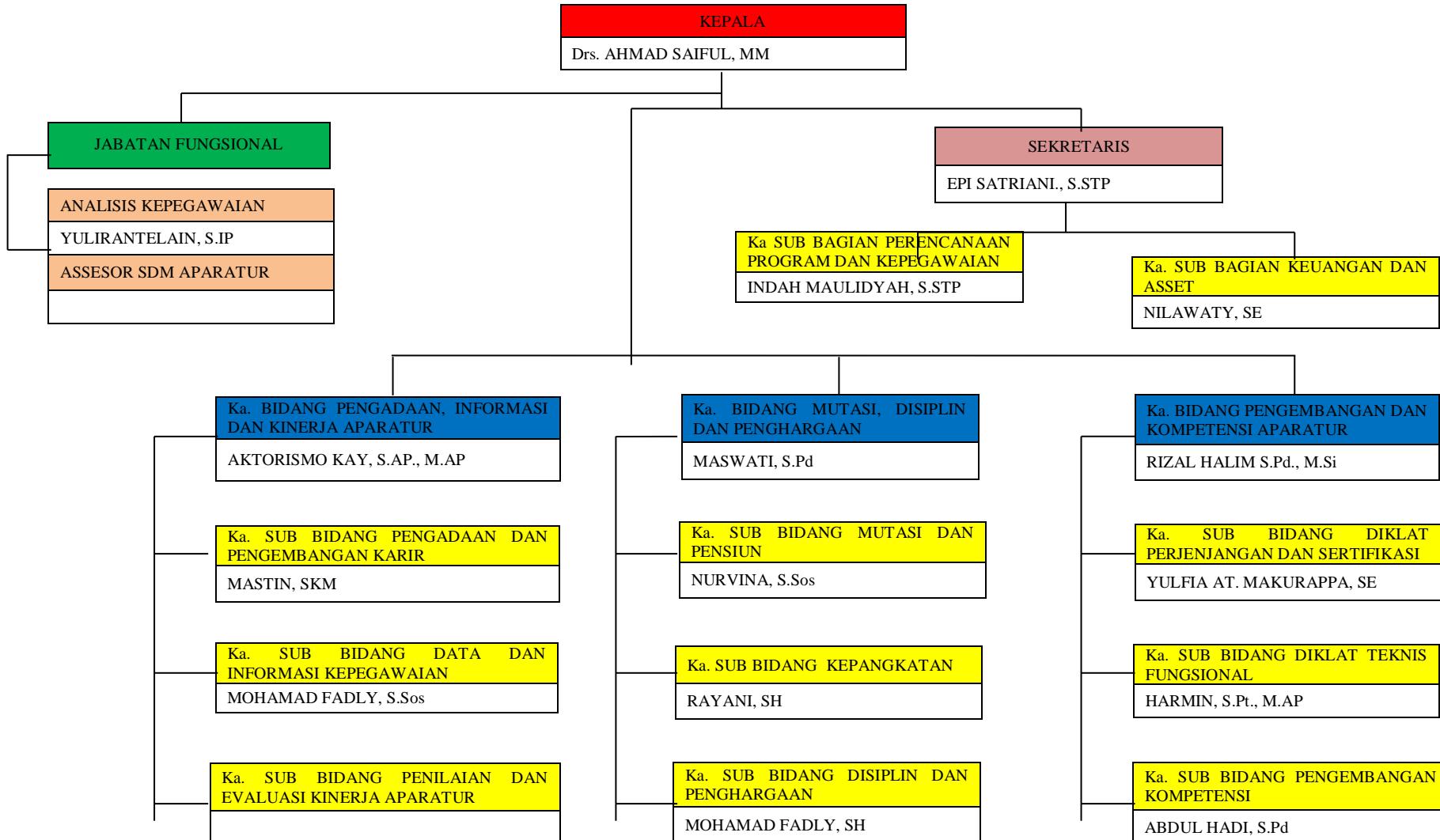
##### **2. Misi**

- a. Peningkatan sumber daya aparatur;
- b. Mewujudkan pelayanan prima dan penegakan disiplin PNS
- c. Meningkatkan manajemen kepegawaian yang baik dan sistematis

#### 4.1.4 Struktur Organisasi Lokasi Penelitian

### STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Gambar 4.1 struktur organisasi



#### 4.1.5 Deskriptif Karakteristik Responden

##### 1. Jenis Kelamin

Dari hasil penelitian yang dilakukan mendapatkan data responden berdasarkan jenis kelamin yang dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 4.1. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Frekwensi ( $\Sigma$ )	Presentase(%)
Laki-laki	29	52.73%
Perempuan	26	47.27%
Total	55	100%

Sumber: Hasil Olahan Data 2021

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah responden laki-laki yaitu 29 orang atau sekitar 52.73%, sedangkan jumlah responden perempuan sebanyak 26 orang atau sekitar 47.27%. hal ini menunjukkan bahwa antara responden laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan responden perempuan yang bekerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong

##### 2. Pendidikan

Dari hasil penelitian yang dilakukan mendapatkan data responden berdasarkan jenis pendidikan yang dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 4.2. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pendidikan**

Pendidikan	Frekwensi ( $\Sigma$ )	Presentase (%)
SD	0	0

SMP	0	0
SMA/SMK	12	21.82%
Sarjana	28	50.91%
Magister	9	16.36%
Doktor	6	10.91%
Total	55	100.00%

Sumber: Hasil Olahan Data 2021

Dari table diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah responden yang memiliki pendidikan SMA/SMK yaitu 12 orang atau sekitar 21.82%, jumlah responden yang memiliki pendidikan Sarjana sebanyak 28 orang atau sekitar 50.91%, jumlah responden yang memiliki pendidikan Magister sebanyak 9 orang atau 16.36%, sedangkan responden yang memiliki pendidikan Doktor yaitu 6 orang atau sekitar 10.91%, hal ini menunjukkan bahwa yang bekerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong didominasi oleh responden yang berpendidikan Sarjana.

### 3. Umur

Dari hasil penelitian yang dilakukan mendapatkan data responden berdasarkan jenis pendidikan yang dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 4.3. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Umur**

Umur	Frekwensi ( $\Sigma$ )	Persentase (%)
< 20 Tahun	0	0
20 – 30 Tahun	31	56.36%
>30 Tahun	24	43.64%

Total	55	100%
-------	----	------

Sumber: Hasil Olahan Data 2021

Dari table diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah responden yang berumur 20-30 tahun sebanyak 31 orang atau sekitar 56.36%, sedangkan jumlah responden yang berumur di atas 30 tahun sebanyak 24 orang atau sekitar 43.64%. hal ini menunjukkan bahwa responden yang berumur 20-30 tahun lebih mendominasi dibandingkan dengan responden yang berumur 30 tahun ke atas yang bekerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong.

## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Deskriptif Variabel Penelitian

Berikut ini akan disajikan gambaran hasil tabulasi data atau variable yang menjadi objek penelitian dan criteria interpretasi skor sebagai berikut:

**Jumlah skor tertinggi :  $5 \times 1 \times 55 = 275$**

**Jumlah skor terendah:  $1 \times 1 \times 55 = 55$**

**Rentang Skala :  $\frac{275-55}{5} = 44$**

**Tabel 4.4 Kriteria Interpretasi Skor**

Rentang Skor	Kriteria
235 – 279	Sangat tinggi
190 – 234	Tinggi
145 – 189	Sedang
100 – 144	Rendah
55 – 99	Sangat rendah

Sumber: Hasil Olahan Data 2021

Berikut ini akan disajikan gambaran hasil tabulasi data atau variable yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan data yang telah terkumpul dari 55 responden yang ditetapkan sebagai sampel data variabel dapat ditabulasi seperti berikut ini:

### 1. Audit Keuangan (X1)

Berdasarkan tabulasi data yang dilakukan diperoleh nilai untuk masing-masing indikator dari sub variabel Audit Keuangan (X1) menurut tinjauan responden sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Tanggapan Responden Variabel Audit Keuangan (X1)**

BOBOT	Audit Keuangan (X1)														
	Pernyataan X1.1			Pernyataan X1.2			Pernyataan X1.3			Pernyataan X1.4			Pernyataan X1.5		
	F	SKOR	%	F	SKOR	%	F	SKOR	%	F	SKOR	%	F	SKOR	%
1	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
2	2	4	3.6	3	6	5.5	3	6	5.5	3	6	5.5	1	2	1.8
3	19	57	34.5	18	54	32.7	19	57	34.5	20	60	36.4	13	39	23.6
4	26	104	47.3	26	104	47.3	25	100	45.5	24	96	43.6	34	136	61.8
5	8	40	14.5	8	40	14.5	8	40	14.5	8	40	14.5	7	35	12.7
Σ	55	205	100.0	55	204	100.0	55	203	100.0	55	202	100.0	55	212	100.0
KATEGORI	TINGGI			TINGGI			TINGGI			TINGGI			TINGGI		

Sumber: Hasil Olah Data 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 55 responden yang diteliti secara umum, persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel Audit Keuangan responden yang menjawab item pernyataan X1.1, memperoleh skor sebesar 205 dengan kategori **Tinggi**, responden yang menjawab menjawab item pernyataan X1.2, memperoleh skor sebesar 204 dengan kategori **Tinggi**, responden yang menjawab item pernyataan X1.3, memperoleh skor sebesar 203 dengan kategori

**Tinggi**, responden yang menjawab item pernyataan X1.4, memperoleh skor sebesar 202 dengan kategori **Tinggi**, responden yang menjawab item pernyataan X1.5, memperoleh skor sebesar 212 dengan kategori **Tinggi**.

## 2. Audit Kinerja (X2)

Berdasarkan tabulasi data yang dilakukan diperoleh nilai untuk masing-masing indikator dari sub variabel Audit Kinerja (X2) menurut tinjauan responden sebagai berikut:

**Tabel 4.6 Tanggapan Responden Variabel Audit Kinerja (X2)**

bobot	Audit Kinerja											
	Pernyataan X2.1			Pernyataan X2.2			Pernyataan X2.3			Pernyataan X2.4		
	F	SKOR	%									
1	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
2	2	4	3.6	1	2	1.8	2	4	3.6	2	4	3.6
3	15	45	27.3	12	36	21.8	19	57	34.5	15	45	27.3
4	27	108	49.1	32	128	58.2	26	104	47.3	26	104	47.3
5	11	55	20.0	10	50	18.2	8	40	14.5	12	60	21.8
$\Sigma$	55	212	100.0	55	216	100.0	55	205	100.0	55	213	100.0
kategori	TINGGI			TINGGI			TINGGI			TINGGI		

Sumber: Hasil Olah Data 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 55 responden yang diteliti secara umum, persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel Audit Kinerja responden yang menjawab item pernyataan X2.1, memperoleh skor sebesar 212 dengan kategori **Tinggi**, responden yang menjawab menjawab item pernyataan X2.2, memperoleh skor sebesar 216 dengan kategori **Tinggi**, responden yang menjawab item pernyataan X2.3, memperoleh skor sebesar 205 dengan kategori

**Tinggi**, responden yang menjawab item pernyataan X2.4, memperoleh skor sebesar 213 dengan kategori **Tinggi**.

### 3. Audit Investigasi (X3)

Berdasarkan tabulasi data yang dilakukan diperoleh nilai untuk masing-masing indikator dari sub variabel Audit Investigasi (X3) menurut tinjauan responden sebagai berikut:

**Tabel 4.7 Tanggapan Responden Variabel Audit Investigasi (X3)**

bobot	Audit Investigasi											
	Pernyataan X3.1			Pernyataan X3.2			Pernyataan X3.3			Pernyataan X3.4		
	F	SKOR	%	F	SKOR	%	F	SKOR	%	F	SKOR	%
1	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
2	2	4	3.6	1	2	1.8	1	2	1.8	1	2	1.8
3	19	57	34.5	15	45	27.3	19	57	34.5	13	39	23.6
4	26	104	47.3	27	108	49.1	26	104	47.3	34	136	61.8
5	8	40	14.5	12	60	21.8	9	45	16.4	7	35	12.7
$\Sigma$	55	205	100.0	55	215	100.0	55	208	100.0	55	212	100.0
kategori	TINGGI			TINGGI			TINGGI			TINGGI		

Sumber: Hasil Olah Data 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 55 responden yang diteliti secara umum, persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel Audit Investigasi responden yang menjawab item pernyataan X3.1, memperoleh skor sebesar 205 dengan kategori **Tinggi**, responden yang menjawab menjawab item pernyataan X3.2, memperoleh skor sebesar 215 dengan kategori **Tinggi**, responden yang menjawab item pernyataan X3.3, memperoleh skor sebesar 208 dengan kategori

**Tinggi**, responden yang menjawab item pernyataan X3.4, memperoleh skor sebesar 212 dengan kategori **Tinggi**.

#### 4. Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Berdasarkan tabulasi data yang dilakukan diperoleh nilai untuk masing-masing indikator dari sub variabel Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y) menurut tinjauan responden sebagai berikut:

**Tabel 4.8 Tanggapan Responden Variabel Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y)**

Bobot	Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah														
	Pernyataan Y1			Pernyataan Y2			Pernyataan Y3			Pernyataan Y4			Pernyataan Y5		
	F	SKOR	%	F	SKOR	%	F	SKOR	%	F	SKOR	%	F	SKOR	%
1	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
2	2	4	3.6	3	6	5.5	1	2	1.8	1	2	1.8	1	2	1.8
3	19	57	34.5	19	57	34.5	13	39	23.6	12	36	21.8	15	45	27.3
4	26	104	47.3	25	100	45.5	34	136	61.8	32	128	58.2	27	108	49.1
5	8	40	14.5	8	40	14.5	7	35	12.7	10	50	18.2	12	60	21.8
$\Sigma$	55	205	100.0	55	203	100.0	55	212	100.0	55	216	100.0	55	215	100.0
kategori	TINGGI			TINGGI			TINGGI			TINGGI			TINGGI		

Sumber: Hasil Olah Data 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 55 responden yang diteliti secara umum, persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel kualitas kinerja pemerintah daerah responden yang menjawab item pernyataan Y1, memperoleh skor sebesar 205 dengan kategori **Tinggi**, responden yang menjawab menjawab item pernyataan Y2, memperoleh skor sebesar 203 dengan kategori **Tinggi**, responden yang menjawab item pernyataan Y3, memperoleh skor sebesar

212 dengan kategori **Tinggi**, responden yang menjawab item pernyataan Y4, memperoleh skor sebesar 216 dengan kategori **Tinggi**, responden yang menjawab item pernyataan Y5, memperoleh skor sebesar 215 dengan kategori **Tinggi**.

#### 4.2.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

##### 1. Uji validitas dan reliabilitas variabel Audit Keuangan

Hasil pengujian validitas dan reliabilitas dari sub variabel Audit Keuangan (X1) dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Audit Keuangan (X1)**

Variabel	Indikator	Uji Validitas dan Reliabilitas				
		$r_{hitung}$	Ket	Alpha Cronbach	Standar	Keterangan
Audit Keuangan	X1.1	0.985	Valid Jika $r > 0,30$	0,965	$> 0,6 =$ Reliable	Valid dan Reliabel
	X1.2	0.979				Valid dan Reliabel
	X1.3	0.951				Valid dan Reliabel
	X1.4	0.944				Valid dan Reliabel
	X1.5	0.820				Valid dan Reliabel

Sumber : Hasil Olahan data 2021

Dari tabel 4.9 di atas menjelaskan bahwa dimana semua item pernyataan untuk sub variabel Audit Keuangan (X1) semua instrumen menunjukan hasil yang valid dan reliable. Keputusan ini diambil karena nilai korelasi yang lebih besar 0,30, sedangkan koefisien alphanya sebesar 0,965, dengan demikian berarti semua

item pernyataan untuk sub variabel Audit Keuangan (X1) adalah Valid dan Reliabel.

## 2. Uji validitas dan reliabilitas variabel Audit Kinerja

Hasil pengujian validitas dan reliabilitas dari sub variabel Audit Kinerja (X2) dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Audit Kinerja (X2)**

Variabel	Indikator	Uji Validitas dan Realibilitas				
		$r_{hitung}$	Ket	Alpha Cronbach	Standar	Keterangan
Audit Kinerja	X2.1	0.967	Valid	Jika $r > 0,30$	0,951	Valid dan Reliabel
	X2.2	0.936				Valid dan Reliabel
	X2.3	0.873				Valid dan Reliabel
	X2.4	0.962				Valid dan Reliabel

Sumber : Hasil Olahan data 2021

Dari tabel 4.10 di atas menjelaskan bahwa dimana semua item pernyataan untuk sub variabel Audit Kinerja (X2) semua instrumen menunjukan hasil yang valid dan reliable. Keputusan ini diambil karena nilai korelasi yang lebih besar 0,30, sedangkan koefisien alphanya sebesar 0,951, dengan demikian berarti semua item pernyataan untuk sub variabel Audit Kinerja (X2) adalah Valid dan Reliabel.

## 3. Uji validitas dan reliabilitas variabel Audit Investigasi

Hasil pengujian validitas dan reliabilitas dari sub variabel Audit Investigasi (X3) dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Audit Investigasi (X3)**

Variabel	Indikator	Uji Validitas dan Reliabilitas				
		$r_{hitung}$	Ket	Alpha Cronbach	Standar	Keterangan
Audit Investigasi	X3.1	0.912	Valid Jika $r > 0,30$	0,883	$> 0,6 =$ Reliable	Valid dan Reliabel
	X3.2	0.832				Valid dan Reliabel
	X3.3	0.897				Valid dan Reliabel
	X3.4	0.800				Valid dan Reliabel

Sumber : Hasil Olahan data 2021

Dari tabel 4.11 di atas menjelaskan bahwa dimana semua item pernyataan untuk sub variabel Audit Investigasi (X3) semua instrumen menunjukan hasil yang valid dan reliable. Keputusan ini diambil karena nilai korelasi yang lebih besar 0,30, sedangkan koefisien alphanya sebesar 0,883, dengan demikian berarti semua item pernyataan untuk sub variabel Audit Investigasi (X3) adalah Valid dan Reliabel.

#### **4. Uji validitas dan reliabilitas variabel Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah**

Hasil pengujian validitas dan reliabilitas dari sub variabel Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y) dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y)**

Variabel	Indikator	Uji Validitas dan Reliabilitas				
		$r_{hitung}$	Ket	Alpha Cronbach	Standar	Keterangan
Kualitas Kinerja Pegawai Pemerintah	Y1	0.926	Valid Jika $r > 0,30$	0,923	$> 0,6 =$ Reliable	Valid dan Reliabel
	Y2	0.902				Valid dan Reliabel
	Y3	0.874				Valid dan Reliabel
	Y4	0.921				Valid dan Reliabel
	Y5	0.761				Valid dan Reliabel

Sumber : Hasil Olahan data 2021

Dari tabel 4.12 di atas menjelaskan bahwa dimana semua item pernyataan untuk sub variabel Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y) semua instrumen menunjukkan hasil yang valid dan reliable. Keputusan ini diambil karena nilai korelasi yang lebih besar 0,30, sedangkan koefisien alphanya sebesar 0,923, dengan demikian berarti semua item pernyataan untuk sub variabel Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y) adalah Valid dan Reliabel.

Pengujian terhadap hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan statistic melalui teknik atau metode analisis jregresi berganda. Analisis kuantitatif atau variabel-variabel independen yaitu Audit Sektor Publik yang berpengaruh terhadap Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah

pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong.

Hasil dari analisis regresi tersebut nantinya akan diketahui apakah variabel-variabel bebas (Independen) baik secara simultan ataupun secara parsial memberikan pengaruh yang nyata (Signifikan) terhadap variabel terikat (Dependen). Berdasarkan hasil pengolahan data atas 55 orang responden dengan menggunakan program SPSS versi 22.

#### **4.2.3 Analisis Data**

Dalam proses penelitian, kegiatan yang terpenting adalah pengolahan data. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Audit Sektor Publik terhadap Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah baik secara simultan maupun parsial pada kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong. Maka berikut ini akan dikemukakan analisis hasil statistik. Berdasarkan hasil analisis yang menggunakan analisis jalur dengan menggunakan program SPSS, maka berikut ini akan disajikan hasil pengujian hipotesis dan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebagai berikut:

Untuk mengetahui pengaruh Audit Sektor Publik (X), Audit Keuangan (X1), Audit Kinerja (X2), Audit Investigasi (X3), terhadap Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong, maka berikut ini akan disajikan analisis hasil yang dapat dilihat melalui persamaan fungsional dalam model *simultan* sebagai berikut:

$$Y = 0,988 + 0,223X_1 + 0,459X_2 + 0,472X_3 + 0,012\epsilon$$

Dari persamaan regresi di atas maka dapat diinterpretasikan Bahwa:

1.  $a = 0,988$  artinya variabel kualitas kinerja pemerintah daerah (Y) mempunyai nilai konstanta sebesar 98,8% jika variabel audit sektor public yang terdiri dari audit keuangan (X1), variabel audit Kinerja (X2), variabel audit investigasi (X3) diabaikan.
2.  $X_1 = 0,223$  artinya apabila variabel audit keuangan (X1) dilaksanakan maka akan diikuti kenaikan kinerja pemerintah daerah sebesar 22,3%.
3.  $X_2 = 0,459$  artinya apabila variabel audit kinerja (X2) dilaksanakan maka akan diikuti kenaikan kinerja pemerintah daerah sebesar 45,9%.
4.  $X_3 = 0,472$  artinya apabila variabel audit investigasi (X3) dilaksanakan maka akan diikuti kenaikan kinerja pemerintah daerah sebesar 47,2%.
5.  $\epsilon = 0,012$  artinya terdapat variabel luar yang tidak dijelaskan dalam model penelitian ini tetapi mempunyai nilai sebesar 1,2%

Dari persamaan regresi di atas, maka dapat dilihat hasil hipotesis seperti pada tabel berikut:

**Tabel 4.13**  
**Hasil Pengujian Hipotesis dan Besarnya Pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y**

Pengaruh Antar Variabel	Besarnya Pengaruh	Nilai Signifikan	Alpha ( $\alpha$ )	Keputusan	Kesimpulan
$Y \leftarrow X_1, X_2, X_3$	0,988	0,000	0,05	Signifikan	Diterima
$Y \leftarrow X_1$	0,223	0,000	0,05	Signifikan	Diterima
$Y \leftarrow X_2$	0,459	0,000	0,05	Signifikan	Diterima
$Y \leftarrow X_3$	0,472	0,000	0,05	Signifikan	Diterima

Sumber : Hasil Olah Data 2021

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kualitas kinerja pemerintah daerah yang dijelaskan oleh variabel audit sektor publik yang meliputi audit keuangan ( $X_1$ ), audit kinerja ( $X_2$ ) audit investigasi ( $X_3$ ), secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah pada kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong sebesar 0,988 (98,8%) dengan taraf uji signifikansi 5%, karena nilai  $sig < \text{nilai } \alpha$  ( $\alpha$ ) yaitu  $0,000 < 0,05$ .

Pengaruh variabel audit keuangan ( $X_1$ ), secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kualitas kinerja pemerintah Daerah sebesar 0,223 (22,3%) dengan taraf uji signifikansi 5%, karena nilai  $sig < \text{nilai } \alpha$  ( $\alpha$ ) =  $0,000 < 0,05$ . Pengaruh variabel audit kinerja ( $X_2$ ), secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kualitas kinerja pemerintah Daerah sebesar 0,459 (45,9%) dengan taraf uji signifikansi 5%, karena nilai  $sig < \text{nilai } \alpha$  ( $\alpha$ ) =  $0,000 <$

0,05. Pengaruh variabel audit investigasi ( $X_3$ ), secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah sebesar 0,472 (47,2%) dengan taraf uji signifikansi 5%, karena nilai  $sig < \text{nilai } \alpha = 0,000 < 0,05$ .

**Tabel 4,14**  
**Koefisien Jalur, Pengaruh Langsung, Pengaruh Total Audit variabel Sektor Publik (X) Terhadap Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y)**

Variabel	kontribusi Langsung	Kontribusi bersama
X1 ke Y	0,223	22,3%
X2 ke Y	0,459	45,9%
X3 ke Y	0,472	47,2%
Pengaruh variabel X ke Y	0,988	98,8%
$\epsilon$	0,012	1,2%
Total		100%

Sumber : Hasil Olah Data 2021

#### **4.2.3.1 Pengaruh audit keuangan (X1) audit kinerja (X2) dan audit investigasi (X3) terhadap kualitas kinerja pemerintah daerah**

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa hasil uji  $F_{\text{hitung}}$  menunjukkan hasil sebesar 1374,624 sedangkan untuk nilai  $F_{\text{tabel}}$  sebesar 3,180 ( $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ ) ( $1374,624 > 3,180$ ). Sementara Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan hasil sebesar 0,988 atau 98,8%. Hal ini menunjukkan bahwa audit keuangan (X1) audit kinerja (X2) dan audit investigasi (X3) terhadap kualitas kinerja

pemerintah daerah, sementara sisanya sebesar 0,012 atau 1,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Dari hasil ini secara statistic variabel audit keuangan (X1) audit kinerja (X2) dan audit investigasi (X3) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas kinerja pemerintah daerah jadi hipotesis **diterima**.

#### **4.2.3.2 Audit keuangan (X1) secara Parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas kinerja pemerintah daerah**

Dari hasil olahan data Pengaruh variabel audit keuangan (X<sub>1</sub>), secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kualitas kinerja pemerintah Daerah dengan nilai koefisien sebesar 0,223 (22,3%) dengan taraf uji signifikansi 5%, karena nilai *sig* lebih kecil dari nilai *alpha* ( $\alpha$ ) = 0,000 < 0,05. Jadi hipotesis yang diajukan menyatakan bahwa audit keuangan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas kinerja pemerintah daerah (Y) dapat **diterima**.

#### **4.2.3.3 Audit kinerja (X2) secara Parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas kinerja pemerintah daerah**

Dari hasil olahan data Pengaruh variabel audit kinerja (X<sub>2</sub>), secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kualitas kinerja pemerintah Daerah dengan nilai koefisien sebesar 0,459 (45,9%) dengan taraf uji signifikansi 5%, karena nilai *sig* lebih kecil dari nilai *alpha* ( $\alpha$ ) = 0,000 < 0,05. Jadi hipotesis yang diajukan menyatakan bahwa audit kinerja (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas kinerja pemerintah daerah (Y) dapat **diterima**.

#### **4.2.3.4 Audit investigasi (X3) secara Parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas kinerja pemerintah daerah**

Dari hasil olahan data Pengaruh variabel audit investigasi (X<sub>3</sub>), secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah dengan nilai koefisien sebesar 0,472 (47,2%) dengan taraf uji signifikansi 5%, karena nilai *sig* lebih kecil dari nilai *alpha* ( $\alpha$ ) = 0,000 < 0,05. Jadi hipotesis yang diajukan menyatakan bahwa audit investigasi (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas kinerja pemerintah daerah (Y) dapat **diterima**.

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Pengaruh Audit Sektor Publik Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menunjukan bahwa kontribusi variabel audit sektor public (X), audit keuangan (X1), audit kinerja (X2), audit investigasi (X3) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas kinerja pemerintah daerah (Y) sebesar 0,223 atau 22,3% untuk X1, sebesar 0,459 atau 45,9% untuk X2, dan sebesar 0,472 atau 47,2% untuk X3.

Audit sektor publik adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembbiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan Negara lainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dengan kriteria yang ditetapkan. Audit yang dilakukan terhadap sektor publik pemerintah berbeda dengan yang

dilakukan terhadap sektor swasta. Perbedaan yang terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang institusional dan hukum.

Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat variabel lain yang turut berpengaruh terhadap variabel kualitas kinerja pegawai pemerintah, namun tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini. Variabel lain tersebut adalah audit kepatuhan yang didesain untuk memastikan bahwa pengendalian internal yang digunakan atau diandalkan oleh auditor dalam praktiknya dapat berjalan dengan baik, dan sesuai dengan sistem yang ada, prosedur dan pengaturan keuangan yang telah ditetapkan. Sifat dari pengujian ini sangat tergantung pada sifat pengendalian. Secara esensial, pengujian ini meliputi pengecekan implementasi prosedur ransaksi sebagai bukti kepatuhan. Audit kepatuhan mempunyai nilai sebesar 0,988 atau sebesar 98,8%. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan tetapi nilai yang dihasilkan sangat kurang.

Menurut I Gusti Agung Rai (2008:29) Pemeriksaan sektor publik adalah kegiatan yang ditujukan kepada badan usaha yang menyediakan jasa dan barang yang pembbiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya, dengan tujuan untuk mengkonfrontir kondisi yang ditemukan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit terhadap sektor publik sangat penting dilakukan hal ini merupakan bentuk tanggung jawab setor publik (pemerintah pusat dan daerah) untuk mempertanggungjawabkan dana yang telah digunakan oleh instansi sehingga dapat

diketahui pemanfaatan dana tersebut dilaksanakan sesuai prosedur dan standar atau tidak, (Anis Ranchman Utary Dan Muhammad Iqbal. 2014:9)

#### **4.3.2 Audit Keuangan Secara Parsial Berpengaruh Terhadap Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa audit keuangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas kinerja pemerintah daerah. Ini menandakan bahwa jika audit keuangan dilakukan maka otomatis akan mempengaruhi kualitas kinerja pemerintah daerah. Begitu pula sebaliknya apabila audit keuangan tidak dilakukan maka tidak akan mempengaruhi kualitas kinerja pegawai pemerintah.

Audit keuangan yang merupakan jenis dari audit sektor public yang merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan bahkan merupakan hal yang paling utama dilakukan ketika akan dilakukannya kegiatan audit sektor publik. Tujuan dilakukannya audit keuangan adalah untuk mengungkapkan suatu opini yang jujur mengenai posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum ataupun khusus.

Hasil penelitian ini menunjukkan dimana bahwa variabel audit keuangan mempunyai nilai pengaruh yang kecil dibandingkan dari variabel lainnya yang diteliti. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa responden, hal ini menjelaskan bahwa meskipun audit keuangan merupakan hal terpenting dalam pelaksanaan audit tetapi hal tersebut bukan merupakan suatu ukuran untuk mengukur

seberapa besar kualitas kinerja pemerintah daerah yang dihasilkan. Karena ada beberapa audit lain yang menjadi salah satu faktor untuk mengukur suatu kinerja pemerintah daerah yang juga sangat mempengaruhi kualitas kinerja pemerintah daerah.

Tujuan dilakukannya pengujian laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat yang jujur tentang posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan auditor adalah sarana untuk menyatakan pendapat auditor dalam kondisi tertentu, menyangkal pendapat. Audit keuangan meliputi audit atas laporan keuangan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan keuangan. Audit atas laporan keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas yang diaudit menyajikan secara memadai posisi keuangan, hasil operasi atau operasi dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

#### **4.3.3 Audit Kinerja Secara Parsial Berpengaruh Terhadap Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa audit kinerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa jika audit kinerja dilakukan maka akan dapat mempengaruhi kualitas kinerja pegawai pemerintah. Tetapi jika audit kinerja tidak dilaksanakan maka kualitas kinerja pegawai pemerintah tidak akan berpengaruh terhadap kualitas kinerja pemerintah daerah

Audit kinerja adalah suatu proses pemeriksaan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja atau kegiatan pemerintah yang diaudit. Dengan audit kinerja, pencapaian hasil yang diinginkan akan disesuaikan dengan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga dapat diambil suatu tindakan pengkoreksian agar dapat diambil suatu keputusan apakah akan meningkatkan kinerja pemerintah atau tidak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimana variabel audit kinerja merupakan variabel yang nilai pengaruhnya lebih besar dari variabel lain yang diteliti. Hal ini menunjukkan bahwa audit kinerja sangat berperan penting bagi kualitas kinerja pegawai pemerintah, sesuai hasil wawancara mengapa audit kinerja sangat berperan penting karena setiap pemerintah pasti akan diperiksa hasil kinerjanya apakah kinerja dari pemerintah yang dilakukan sangat baik atau tidak, maka dari itu audit kinerja sangat diperlukan agar dapat menilai kinerja dari setiap pemerintah agar nantinya dapat diambil suatu keputusan.

Dari manfaat dilakukannya Audit kinerja dapat disimpulkan bahwa untuk pengukuran kinerja suatu instansi maka audit kinerja sangat berperan penting dalam meningkatkan kinerja suatu entitas yang diaudit dengan cara sebagai berikut:

- 1). Mengidentifikasi permasalahan dan alternatif penyelesaian;
- 2). Mengidentifikasi sebab-sebab actual (tidak hanya gejala atau perkiraan-perkiraan) dan suatu permasalahan yang dapat diatasi oleh kebijakan manajemen atau tindakan lainnya;

- 3). Mengidentifikasi peluang atau kemungkinan untuk mengatasi keborosan atau ketidakefisienan;
- 4). Mengidentifikasi kriteria untuk menilai pencapaian tujuan organisasi;
- 5). Melakukan evaluasi atas sistem pengendalian internal;
- 6). Menyediakan jalur komunikasi antara tataran;
- 7). Melaporkan ketidakberesan;

#### **4.3.4 Audit Investigasi Secara Parsial Berpengaruh Terhadap Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa audit investigasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa jika audit investigasi dilakukan maka akan dapat mempengaruhi kualitas kinerja pegawai pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa audit investigasi juga berperan penting bagi kualitas kinerja pegawai pemerintah dikarenakan audit investigasi merupakan pemeriksaan lanjutan dari temuan audit yang dilakukan sebelum audit investigasi.

Audit investigasi adalah suatu proses mencari, menemukan, mengumpulkan, menganalisa, dan mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau bukti yang diduga mengandung tindakkan penyalahgunaan wewenang atau tindakan lainnya yang melanggar aturan-aturan yang berlaku. Tujuan audit investigasi yaitu mencari temuan lebih lanjut atas temuan audit yang dilakukan sebelumnya, serta dalam pelaksanaan

audit agar dapat membuktikan kebenaran berdasarkan apa yang di diadukan masyarakat atau informasi yang didapatkan dari masyarakat terkait kecurangan atau kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa audit investigasi mempunyai nilai pengaruh yang besar setelah audit kinerja. Yang artinya, audit investigasi juga sangat berpengaruh terhadap kualitas kinerja pemerintah daerah, dikarenakan audit investigasi merupakan audit lanjutan atau audit khusus yang dilakukan oleh pihak yang berwenang terkait kegiatan audit yang dilakukan sebelumnya. Audit investigasi dilakukan lebih spesifik karena akan mempengaruhi siapa yang bertanggung jawab atas temuan audit yang dilakukan, sehingga dengan begitu audit investigasi akan sangat mempengaruhi kualitas kinerja pemerintah daerah.

Tujuan audit investigasi adalah mengadakan temuan lebih lanjut atas temuan audit sebelumnya, serta melaksanakan audit untuk membuktikan kebenaran berdasarkan pengaduan atau informasi masyarakat. Tanggung jawab pelaksanaan audit investigasi terletak pada lembaga audit atau satuan pengawas. Adapun sumber informasi audit investigasi adalah:

- a. Pengembangan temuan audit sebelumnya,
- b. Adanya pengaduan dari masyarakat,

- c. Adanya permintaan dari dewan komisaris atau DPR untuk melakukan audit, misalnya karena adanya dugaan manajemen atau pejabat yang melakukan penyelewengan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Audit Keuangan (X1), Audit Kinerja (X2), dan Audit Investigasi (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y), pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong.
2. Audit Keuangan (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y), pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong.
3. Audit Kinerja (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y), pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong.
4. Audit Investigasi (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y), pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian maka hal-hal yang dapat disarankan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia agar lebih memperhatikan Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah apakah ada kekurangan dalam kinerja pegawai pemerintah atau tidak, sehingga nantinya dapat diambil keputusan untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai pemerintah.
2. Bagi penelitian selanjutnya agar dapat meneliti variabel-variabel lain yang juga turut mempengaruhi kualitas kinerja pemerintah daerah, agar nantinya dapat diketahui variabel yang juga berpengaruh terhadap kualitas kinerja pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2001). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
- Bastian, Indra. 2007. Audit Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat
- Dito Aditia, D.N. dan Puja Rizqy, R. Dan Mika Debora Br. Barus. 2019. Audit Sektor Publik: Mahir Dalam Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kuangan Negara. Ponorogo, Uwais Inspirasi Indonesia
- Dr. Rismawati, S.E., M.M., dan Prof. Dr. Mattalata, S.E., M.Si. 2018. Evaluasi Kinerja : Penilaian Kinerja Atas Dasar Prestasi Kerja Berorientasi Kedepan.
- Flippo, Edwin B, 1995, Manajemen Personalia, Edisi VI, PT. Erlangga, Jakarta.
- Joel G Siegel dan Jae K. Shim. 1994. Kamus Istilah Akuntansi. Jakarta, Elexa Komputindo.
- Kanaka Puradiredja, 1998, "Auditing", Edisi Kelima,Buku Satu, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Matutina, 2001. Manajemen Sumber daya Manusia, cetakan kedua, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta..
- Matutina. 2001. Pengembangan sumber daya manusia terhadap kualitas dan kinerja karyawan pada Giant pulosari malang. Jurnal Ekonomi dan Bisnis
- Mardiasmo. (2001). Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 3 : 2.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi.
- Mahmudi, 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Unit penerbit dan percetakan sekolah tinggi ilmu manajemen YKPN.
- Rai, I Gusti, Agung. 2008. Audit Kinerja pada Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat

Sunarto. 2003. Auditing. Edisi Revisi Cetakan Pertama. Penerbit Panduan. Yogyakarta.

Simamora, Henry. (2002). Auditing. Jilid 1. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

TAP MPR No. X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

TAP MPR No. VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Undang-Undang No.5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Wilopo. 2001. "Faktor-faktor yang Menentukan Kualitas Audit pada Sektor Publik/Pemerintah". Ventura. STIE Perbanas Surabaya. Vol. 4 No. 1. Juni. pp. 27 – 32.

## **LAMPIRAN**

### **LAMPIRAN I. INSTUMEN PENELITIAN**

#### Bagian I : Identitas Responden

Petunjuk : Beri tanda  pada kotak jawaban yang dianggap paling benar dan isi tempat yang telah dikosongkan.

##### A. Data Responden

1. Jenis Kelamin  Laki-laki  Perempuan

2. Usia

: .....

3. Instansi : .....

4. Masa Kerja :  <5  > Tahun

5. Alamat Instansi : .....

B. Pendidikan Terakhir :  SMA/SMK

Diploma

S1

S2

S3

#### Bagian II : Petunjuk Pengisian

a. Kepada Bapak/Ibu/sdr untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada dengan jujur dan sebenarnya.

b. Berilah tanda silang (X) pada kolom yang tersedia dan pilih sesuai keadaan yang sebenarnya.

c. Ada 5 Alternatif jawaban yaitu :

**5** = Selalu

**4** = Sering

**3** = Kadang-kadang

**2** = Jarang

**1** = Tidak Pernah

**A. Audit Sektor Publik (X)**

**1. Audit Keuangan (X1)**

No	Pernyataan
1	<p>Audit Keuangan menghasilkan laporan keuangan yang akurat</p> <p>a. Sangat setuju audit keuangan menghasilkan laporan keuangan yang akurat</p> <p>b. Setuju audit keuangan menghasilkan laporan keuangan yang akurat</p> <p>c. Netral audit keuangan menghasilkan laporan keuangan yang akurat</p> <p>d. Tidak Setuju audit keuangan menghasilkan laporan keuangan yang akurat</p> <p>e. Sangat Tidak Setuju audit keuangan menghasilkan laporan keuangan yang akurat</p>
2	<p>Audit Keuangan Menghasilkan laporan keuangan yang lengkap</p> <p>a. Sangat setuju Audit Keuangan Menghasilkan laporan keuangan yang lengkap</p> <p>b. Setuju Audit Keuangan Menghasilkan laporan keuangan yang lengkap</p> <p>c. Netral Audit Keuangan Menghasilkan laporan keuangan yang lengkap</p> <p>d. Tidak setuju Audit Keuangan Menghasilkan laporan keuangan yang lengkap</p> <p>e. Sangat Tidak Setuju Audit Keuangan Menghasilkan laporan keuangan yang lengkap</p>
3	<p>Audit keuangan Menghasilkan laporan keuangan yang relevan</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sangat setuju Menghasilkan laporan keuangan yang relevan</li> <li>b. Setuju Menghasilkan laporan keuangan yang relevan</li> <li>c. Netral Menghasilkan laporan keuangan yang relevan</li> <li>d. Tidak setuju Menghasilkan laporan keuangan yang relevan</li> <li>e. Sangat tidak setuju Menghasilkan laporan keuangan yang relevan</li> </ul>
4	Audit keuangan Menghasilkan laporan keuangan yang wajar
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sangat setuju Menghasilkan laporan keuangan yang wajar</li> <li>b. Setuju Menghasilkan laporan keuangan yang wajar</li> <li>c. Netral Menghasilkan laporan keuangan yang wajar</li> <li>d. Tidak setuju Menghasilkan laporan keuangan yang wajar</li> <li>e. Sangat tidak setuju Menghasilkan laporan keuangan yang wajar</li> </ul>
5	Audit Keuangan Menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sangat setuju Menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku</li> <li>2. Setuju Menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku</li> <li>3. Netral Menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku</li> <li>4. Tidak setuju Menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku</li> <li>5. Sangat tidak setuju Menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku</li> </ul>

## 2. Variabel Audit Kinerja (X3)

1	Audit Kinerja Menghasilkan peningkatan ekonomi
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sangat setuju Menghasilkan peningkatan ekonomi</li> <li>b. setuju Menghasilkan peningkatan ekonomi</li> <li>c. Netral Menghasilkan peningkatan ekonomi</li> <li>d. Tidak setuju Menghasilkan peningkatan ekonomi</li> <li>e. Sangat tidak setuju Menghasilkan peningkatan ekonomi</li> </ul>
2	<p>Audit Kinerja Menghasilkan peningkatan efisiensi kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sangat setuju Menghasilkan peningkatan efisiensi kinerja</li> <li>b. Setuju Menghasilkan peningkatan efisiensi kinerja</li> <li>c. Netral Menghasilkan peningkatan efisiensi kinerja</li> <li>d. Tidak setuju Menghasilkan peningkatan efisiensi kinerja</li> <li>e. Sangat tidak setuju Menghasilkan peningkatan efisiensi kinerja</li> </ul>
3	<p>Audit Kinerja Menghasilkan peningkatan akuntabilitas pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sangat setuju Menghasilkan peningkatan akuntabilitas pemerintah</li> <li>b. Setuju Menghasilkan peningkatan akuntabilitas pemerintah</li> <li>c. Netral Menghasilkan peningkatan akuntabilitas pemerintah</li> <li>d. Tidak setuju Menghasilkan peningkatan akuntabilitas pemerintah</li> <li>e. Sangat tidak setuju Menghasilkan peningkatan akuntabilitas pemerintah</li> </ul>
4	<p>Audit Kinerja Menghasilkan pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sangat setuju Menghasilkan pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab</li> <li>b. Setuju Menghasilkan pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab</li> <li>c. Netral Menghasilkan pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab</li> </ul>

	<p>d. Tidak setuju Menghasilkan pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab</p> <p>e. Sangat tidak setuju Menghasilkan pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab</p>
--	--

### 3. Variabel Audit Investigasi (X3)

1	<p>Audit Investigasi Menghasilkan proses mencari penyimpangan atau kecurangan</p> <p>a. Sangat setuju Menghasilkan Setuju Menghasilkan proses mencari penyimpangan atau kecurangan</p> <p>b. Netral Menghasilkan proses mencari penyimpangan atau kecurangan</p> <p>c. Tidak setuju Menghasilkan proses mencari penyimpangan atau kecurangan</p> <p>d. Sangat tidak setuju Menghasilkan proses mencari penyimpangan atau kecurangan</p>
2	<p>Audit Investigasi Menghasilkan proses menemukan penyimpangan atau kecurangan</p> <p>a. Sangat setuju Menghasilkan proses menemukan penyimpangan atau kecurangan</p> <p>b. Setuju Menghasilkan proses menemukan penyimpangan atau kecurangan</p> <p>c. Netral Menghasilkan proses menemukan penyimpangan atau kecurangan</p> <p>d. Tidak setuju Menghasilkan proses menemukan penyimpangan atau kecurangan</p> <p>e. Sangat tidak setuju Menghasilkan proses menemukan penyimpangan atau kecurangan</p>

3	Audit Investigasi Menghasilkan pengumpulan bukti penyimpangan atau kecurangan
	<p>a. Sangat setuju Menghasilkan pengumpulan bukti penyimpangan atau kecurangan</p> <p>b. Setuju Menghasilkan pengumpulan bukti penyimpangan atau kecurangan</p> <p>c. Netral Menghasilkan pengumpulan bukti penyimpangan atau kecurangan</p> <p>d. Tidak setuju Menghasilkan pengumpulan bukti penyimpangan atau kecurangan</p> <p>e. Sangat tidak setuju Menghasilkan pengumpulan bukti penyimpangan atau kecurangan</p>
4	Audit Investigasi Menghasilkan tahapan pelaporan audit

#### B. Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

No	Pernyataan
1	Kualitas kinerja pemerintah daerah menghasilkan masukan ( <i>inputs</i> )
	<p>a. Sangat setuju kualitas kinerja pemerintah daerah menghasilkan masukan (<i>inputs</i>)</p> <p>b. Setuju kualitas kinerja pemerintah daerah menghasilkan masukan (<i>inputs</i>)</p> <p>c. Netral kualitas kinerja pemerintah daerah menghasilkan masukan</p>

	<p>(<i>inputs</i>)</p> <p>d. Tidak setuju kualitas pemerintah daerah menghasilkan masukan (<i>inputs</i>)</p> <p>e. Sangat tidak setuju kualitas pegawai pemerintah daerah menghasilkan masukan (<i>inputs</i>)</p>
2	Kualitas kinerja pemerintah daerah menghasilkan suatu Keluaran ( <i>Outputs</i> )
	<p>a. Sangat setuju kualitas kinerja pemerintah daerah menghasilkan suatu Keluaran (<i>Outputs</i>)</p> <p>b. Setuju kualitas kinerja pemerintah daerah menghasilkan suatu Keluaran (<i>Outputs</i>)</p> <p>c. Netral kualitas kinerja pemerintah daerah menghasilkan suatu Keluaran (<i>Outputs</i>)</p> <p>d. Tidak setuju kualitas kinerja pemerintah daerah menghasilkan suatu Keluaran (<i>Outputs</i>)</p> <p>e. Sangat tidak setuju kualitas kinerja pemerintah daerah menghasilkan suatu Keluaran (<i>Outputs</i>)</p>
3	Kualitas kinerja pemerintah daerah menghasilkan suatu Hasil ( <i>Outcomes</i> )
	<p>a. Sangat setuju kualitas kinerja pemerintah daerah menghasilkan suatu Hasil (<i>Outcomes</i>)</p> <p>b. Setuju kualitas kinerja pemerintah daerah menghasilkan suatu Hasil (<i>Outcomes</i>)</p> <p>c. Netral kualitas kinerja pemerintah daerah menghasilkan suatu Hasil (<i>Outcomes</i>)</p> <p>d. Tidak setuju kualitas kinerja pemerintah daerah menghasilkan suatu Hasil (<i>Outcomes</i>)</p> <p>e. Sangat tidak setuju kualitas pemerintah daerah menghasilkan suatu Hasil (<i>Outcomes</i>)</p>

Hasil ( <i>Outcomes</i> )	
4	<p>Kualitas kinerja pemerintah daerah menghasilkan suatu Manfaat (<i>Benefits</i>)</p> <p>a. Sangat setuju kualitas kinerja pemerintah daerah menghasilkan suatu Manfaat (<i>Benefits</i>)</p> <p>b. Setuju kualitas kinerja pemerintah daerah menghasilkan suatu Manfaat (<i>Benefits</i>)</p> <p>c. Netral kualitas kinerja pemerintah daerah menghasilkan suatu Manfaat (<i>Benefits</i>)</p> <p>d. Tidak setuju kualitas kinerja pemerintah daerah menghasilkan suatu Manfaat (<i>Benefits</i>)</p> <p>e. Sangat tidak setuju kualitas pemerintah daerah menghasilkan suatu Manfaat (<i>Benefits</i>)</p>
5	<p>Kualitas kinerja pemerintah daerah menghasilkan suatu Dampak (<i>Impacts</i>)</p> <p>a. Sangat setuju kualitas kinerja pemerintah daerah menghasilkan suatu Dampak (<i>Impacts</i>)</p> <p>b. Setuju kualitas kinerja pemerintah daerah menghasilkan suatu Dampak (<i>Impacts</i>)</p> <p>c. Netral kualitas kinerja pemerintah daerah menghasilkan suatu Dampak (<i>Impacts</i>)</p> <p>d. Tidak setuju kualitas kinerja pemerintah daerah menghasilkan suatu Dampak (<i>Impacts</i>)</p> <p>e. Sangat tidak setuju kualitas kinerja pemerintah daerah menghasilkan suatu Dampak (<i>Impacts</i>)</p>

## LAMPIRAN 2. DATA ORDINAL

Sub Variabel Audit Keuangan (X1)

NO	Item Pernyataan					JUMLAH
	1	2	3	4	5	
1	3	3	3	3	4	16
2	4	4	4	4	5	21
3	4	4	4	4	5	21
4	3	3	3	3	4	16
5	3	3	3	3	3	15
6	4	4	4	4	4	20
7	4	4	4	3	4	19
8	4	4	4	4	4	20
9	3	3	3	3	4	16
10	4	4	4	4	4	20
11	3	3	3	3	4	16
12	3	3	3	3	4	16
13	3	3	3	3	4	16
14	5	5	5	5	4	24
15	2	2	2	2	4	12
16	5	5	5	5	4	24
17	4	4	4	4	4	20
18	5	5	5	5	4	24
19	4	4	4	4	4	20
20	4	4	4	4	4	20
21	4	4	4	4	4	20
22	5	5	5	5	5	25
23	3	3	3	3	3	15
24	4	4	4	4	4	20
25	5	5	5	5	5	25
26	4	4	4	4	4	20
27	4	4	4	4	4	20
28	3	3	3	3	3	15
29	3	3	3	3	3	15
30	4	4	4	4	4	20
31	4	4	4	4	4	20
32	3	3	3	3	3	15
33	3	3	3	3	3	15

34	4	4	4	4	4	20	
35	3	3	3	3	3	15	
36	3	3	3	3	3	15	
37	3	3	3	3	3	15	
38	5	5	5	5	5	25	
39	2	2	2	2	2	10	
40	5	5	5	5	5	25	
41	4	4	4	4	4	20	
42	5	5	5	5	5	25	
43	4	4	4	2	4	18	
44	4	4	4	4	4	20	
45	4	4	4	4	4	20	
46	3	3	3	3	3	15	
47	4	4	4	4	4	20	
48	4	4	4	4	4	20	
49	3	3	3	3	3	15	
50	3	3	3	3	3	15	
51	4	4	4	4	4	20	
52	4	4	2	4	4	18	
53	4	4	4	4	4	20	
54	3	2	3	3	3	14	
55	4	4	4	4	4	20	

**Sub Variabel Audit Kinerja (X2)**

NO	Item Pernyataan				JUMLAH
	1	2	3	4	
1	4	4	3	4	15
2	5	5	4	5	19
3	4	4	4	4	16
4	4	4	3	4	15
5	4	4	3	4	15
6	4	4	4	4	16
7	3	4	4	3	14
8	3	4	4	3	14
9	3	4	3	3	13
10	5	4	4	5	18
11	2	4	3	2	11
12	5	5	3	5	18
13	4	4	3	4	15
14	5	5	5	5	20
15	4	4	2	4	14
16	5	5	5	5	20
17	4	4	4	4	16
18	5	5	5	5	20
19	4	4	4	4	16
20	4	4	4	4	16
21	4	4	4	4	16
22	5	5	5	5	20
23	3	3	3	3	12
24	4	4	4	4	16
25	5	5	5	5	20
26	4	4	4	4	16
27	4	4	4	4	16
28	3	3	3	3	12
29	3	3	3	3	12
30	4	4	4	4	16
31	4	4	4	4	16
32	3	3	3	3	12
33	3	3	3	3	12
34	4	4	4	4	16
35	3	3	3	3	12
36	3	3	3	3	12

37	3	3	3	3	12
38	5	5	5	5	20
39	2	2	2	2	8
40	5	5	5	5	20
41	4	4	4	4	16
42	5	5	5	5	20
43	4	4	4	4	16
44	4	4	4	4	16
45	4	4	4	4	16
46	3	3	3	3	12
47	4	4	4	4	16
48	4	4	4	4	16
49	3	3	3	3	12
50	3	3	3	3	12
51	4	4	4	5	17
52	4	4	4	4	16
53	4	4	4	4	16
54	3	3	3	3	12
55	4	4	4	4	16

**Lampiran 2. Data Ordinal**  
**Sub Variabel Audit Inveatigasi (X3)**

NO	Item Pernyataan				JUMLAH
	1	2	3	4	
1	3	4	3	4	14
2	4	5	4	5	18
3	4	4	4	5	17
4	3	4	3	4	14
5	3	4	3	3	13
6	4	4	4	4	16
7	4	3	4	4	15
8	4	3	4	4	15
9	3	3	3	4	13
10	4	5	4	4	17
11	3	2	3	4	12
12	3	5	3	4	15
13	3	4	3	4	14
14	5	5	5	4	19
15	2	4	2	4	12
16	5	5	5	4	19
17	4	4	4	4	16
18	5	5	5	4	19
19	4	4	4	4	16
20	4	4	4	4	16
21	4	4	4	4	16
22	5	5	5	5	20
23	3	3	3	3	12
24	4	4	4	4	16
25	5	5	5	5	20
26	4	4	4	4	16
27	4	4	4	4	16
28	3	3	3	3	12
29	3	3	3	3	12
30	4	4	4	4	16
31	4	4	4	4	16
32	3	3	3	3	12
33	3	3	3	3	12
34	4	4	4	4	16
35	3	3	3	3	12
36	3	3	3	3	12

37	3	3	3	3	12
38	5	5	5	5	20
39	2	4	4	2	12
40	5	5	5	5	20
41	4	4	4	4	16
42	5	4	4	5	18
43	4	4	4	4	16
44	4	5	5	4	18
45	4	3	3	4	14
46	3	4	4	3	14
47	4	5	5	4	18
48	4	4	4	4	16
49	3	4	4	3	14
50	3	3	3	3	12
51	4	3	3	4	14
52	4	4	4	4	16
53	4	4	4	4	16
54	3	3	3	3	12
55	4	4	4	4	16

**Lampiran 2. Data Ordinal****Variabel Kualitas Kerja Pegawai Pemerintahan (Y)**

NO	Item Pernyataan					JUMLAH
	1	2	3	4	5	
1	3	3	4	4	4	18
2	4	4	5	5	5	23
3	4	4	5	4	4	21
4	3	3	4	4	4	18
5	3	3	3	4	4	17
6	4	4	4	4	4	20
7	4	4	4	4	3	19
8	4	4	4	4	3	19
9	3	3	4	4	3	17
10	4	4	4	4	5	21
11	3	3	4	4	2	16
12	3	3	4	5	5	20
13	3	3	4	4	4	18
14	5	5	4	5	5	24
15	2	2	4	4	4	16
16	5	5	4	5	5	24
17	4	4	4	4	4	20
18	5	5	4	5	5	24
19	4	4	4	4	4	20
20	4	4	4	4	4	20
21	4	4	4	4	4	20
22	5	5	5	5	5	25
23	3	3	3	3	3	15
24	4	4	4	4	4	20
25	5	5	5	5	5	25
26	4	4	4	4	4	20
27	4	4	4	4	4	20
28	3	3	3	3	3	15
29	3	3	3	3	3	15
30	4	4	4	4	4	20
31	4	4	4	4	4	20
32	3	3	3	3	3	15
33	3	3	3	3	3	15
34	4	4	4	4	4	20
35	3	3	3	3	3	15
36	3	3	3	3	3	15

37	3	3	3	3	3	3	15
38	5	5	5	5	5	5	25
39	2	2	2	2	4	4	12
40	5	5	5	5	5	5	25
41	4	4	4	4	4	4	20
42	5	5	5	5	4	4	24
43	4	4	4	4	4	4	20
44	4	4	4	4	5	5	21
45	4	4	4	4	3	3	19
46	3	3	3	3	4	4	16
47	4	4	4	4	5	5	21
48	4	4	4	4	4	4	20
49	3	3	3	3	4	4	16
50	3	3	3	3	3	3	15
51	4	4	4	4	3	3	19
52	4	2	4	4	4	4	18
53	4	4	4	4	4	4	20
54	3	3	3	3	3	3	15
55	4	4	4	4	4	4	20

### LAMPIRAN 3. DATA FREKUENSI

#### Variabel Audit Keuangan (X1)

##### Frequensi Tabel

**X1.1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 5,00	8	14,5	14,5	14,5
4,00	26	47,3	47,3	61,8
3,00	19	34,5	34,5	96,4
2,00	2	3,6	3,6	100,0
Total	55	100,0	100,0	

**X1.2**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 5,00	8	14,5	14,5	14,5
4,00	26	47,3	47,3	61,8
3,00	18	32,7	32,7	94,5
2,00	3	5,5	5,5	100,0
Total	55	100,0	100,0	

**X1.3**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 5,00	8	14,5	14,5	14,5
4,00	25	45,5	45,5	60,0
3,00	19	34,5	34,5	94,5
2,00	3	5,5	5,5	100,0
Total	55	100,0	100,0	

**X1.4**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 5,00	8	14,5	14,5	14,5
4,00	24	43,6	43,6	58,2
3,00	20	36,4	36,4	94,5
2,00	3	5,5	5,5	100,0
Total	55	100,0	100,0	

**X1.5**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 5,00	7	12,7	12,7	12,7
4,00	34	61,8	61,8	74,5
3,00	13	23,6	23,6	98,2
2,00	1	1,8	1,8	100,0
Total	55	100,0	100,0	

### Variabel Audit Kinerja (X2)

#### Frequensi Tabel

**X2.1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 5,00	11	20,0	20,0	20,0
4,00	27	49,1	49,1	69,1
3,00	15	27,3	27,3	96,4
2,00	2	3,6	3,6	100,0
Total	55	100,0	100,0	

**X2.2**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 5,00	10	18,2	18,2	18,2
4,00	32	58,2	58,2	76,4
3,00	12	21,8	21,8	98,2
2,00	1	1,8	1,8	100,0
Total	55	100,0	100,0	

**X2.3**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 5,00	8	14,5	14,5	14,5
4,00	26	47,3	47,3	61,8
3,00	19	34,5	34,5	96,4
2,00	2	3,6	3,6	100,0
Total	55	100,0	100,0	

**X2.4**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 5,00	12	21,8	21,8	21,8
4,00	26	47,3	47,3	69,1
3,00	15	27,3	27,3	96,4
2,00	2	3,6	3,6	100,0
Total	55	100,0	100,0	

### Variabel Audit Investigasi (X3)

#### Frequensi Tabel

X3.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 5,00	8	14,5	14,5	14,5
4,00	26	47,3	47,3	61,8
3,00	19	34,5	34,5	96,4
2,00	2	3,6	3,6	100,0
Total	55	100,0	100,0	

X3.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 5,00	12	21,8	21,8	21,8
4,00	27	49,1	49,1	70,9
3,00	15	27,3	27,3	98,2
2,00	1	1,8	1,8	100,0
Total	55	100,0	100,0	

X3.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 5,00	9	16,4	16,4	16,4
4,00	26	47,3	47,3	63,6
3,00	19	34,5	34,5	98,2
2,00	1	1,8	1,8	100,0
Total	55	100,0	100,0	

X3.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 5,00	7	12,7	12,7	12,7
4,00	34	61,8	61,8	74,5
3,00	13	23,6	23,6	98,2
2,00	1	1,8	1,8	100,0
Total	55	100,0	100,0	

### Variabel Kualitas Kinerja Pegawai Pemerintah (Y)

#### Frequensi Tabel

Y.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 5,00	8	14,5	14,5	14,5
4,00	26	47,3	47,3	61,8
3,00	19	34,5	34,5	96,4
2,00	2	3,6	3,6	100,0
Total	55	100,0	100,0	

Y.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 5,00	8	14,5	14,5	14,5
4,00	25	45,5	45,5	60,0
3,00	19	34,5	34,5	94,5
2,00	3	5,5	5,5	100,0
Total	55	100,0	100,0	

Y.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 5,00	7	12,7	12,7	12,7
4,00	34	61,8	61,8	74,5
3,00	13	23,6	23,6	98,2
2,00	1	1,8	1,8	100,0
Total	55	100,0	100,0	

Y.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 5,00	10	18,2	18,2	18,2
4,00	32	58,2	58,2	76,4
3,00	12	21,8	21,8	98,2

2,00	1	1,8	1,8	100,0
Total	55	100,0	100,0	

Y.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 5,00	12	21,8	21,8	21,8
4,00	27	49,1	49,1	70,9
3,00	15	27,3	27,3	98,2
2,00	1	1,8	1,8	100,0
Total	55	100,0	100,0	

## LAMPIRAN 4. UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

### Variabel Audit Keuangan (X1)

Correlations

		x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	x1
x1.1	Pearson Correlation	1	,985**	,940**	,927**	,746**	,985**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	55	55	55	55	55	55
x1.2	Pearson Correlation	,985**	1	,926**	,912**	,749**	,979**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	55	55	55	55	55	55
x1.3	Pearson Correlation	,940**	,926**	1	,868**	,703**	,951**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	55	55	55	55	55	55
x1.4	Pearson Correlation	,927**	,912**	,868**	1	,694**	,944**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	55	55	55	55	55	55
x1.5	Pearson Correlation	,746**	,749**	,703**	,694**	1	,820**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	55	55	55	55	55	55
x1	Pearson Correlation	,985**	,979**	,951**	,944**	,820**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	55	55	55	55	55	55

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,965	,965	5

### Variabel Audit Kinerja (X2)

#### Correlations

		x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	x2
x2.1	Pearson Correlation	1	,875**	,748**	,986**	,967**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	55	55	55	55	55
x2.2	Pearson Correlation	,875**	1	,777**	,861**	,936**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	55	55	55	55	55
x2.3	Pearson Correlation	,748**	,777**	1	,742**	,873**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	55	55	55	55	55
x2.4	Pearson Correlation	,986**	,861**	,742**	1	,962**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	55	55	55	55	55
x2	Pearson Correlation	,967**	,936**	,873**	,962**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	55	55	55	55	55

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,951	,952	4

### Variabel Audit Investigasi (X3)

#### Correlations

		x3.1	x3.2	x3.3	x3.4	x3
x3.1	Pearson Correlation	1	,574 **	,821 **	,746 **	,912 **
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	55	55	55	55	55
x3.2	Pearson Correlation	,574 **	1	,731 **	,540 **	,832 **
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	55	55	55	55	55
x3.3	Pearson Correlation	,821 **	,731 **	1	,512 **	,897 **
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	55	55	55	55	55
x3.4	Pearson Correlation	,746 **	,540 **	,512 **	1	,800 **
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	55	55	55	55	55
x3	Pearson Correlation	,912 **	,832 **	,897 **	,800 **	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	55	55	55	55	55

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,883	,883	4

### Variabel Kualitas Kinerja Pegawai Pemerintah (Y)

#### Correlations

		y.1	y.2	y.3	y.4	y.5	y
y.1	Pearson Correlation	1	,940**	,746**	,777**	,574**	,926**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	55	55	55	55	55	55
y.2	Pearson Correlation	,940**	1	,703**	,739**	,544**	,902**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	55	55	55	55	55	55
y.3	Pearson Correlation	,746**	,703**	1	,884**	,540**	,874**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	55	55	55	55	55	55
y.4	Pearson Correlation	,777**	,739**	,884**	1	,665**	,921**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	55	55	55	55	55	55
y.5	Pearson Correlation	,574**	,544**	,540**	,665**	1	,761**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	55	55	55	55	55	55
y	Pearson Correlation	,926**	,902**	,874**	,921**	,761**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	55	55	55	55	55	55

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,923	,925	5

## LAMPIRAN 5. CORRELASI DAN t TABEL

Correlations

		x1	x2	x3	y
x1	Pearson Correlation	1	,902**	,926**	,957**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
	N	55	55	55	55
x2	Pearson Correlation	,902**	1	,906**	,965**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	55	55	55	55
x3	Pearson Correlation	,926**	,906**	1	,968**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000
	N	55	55	55	55
y	Pearson Correlation	,957**	,965**	,968**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	55	55	55	55

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Model Summary

Mod el	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,994 <sup>a</sup>	,988	,987	,36274	,988	1374,62 4	3	51	,000

a. Predictors: (Constant), x3, x2, x1

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	542,635	3	180,878	1374,624	,000 <sup>b</sup>
	Residual	6,711	51	,132		
	Total	549,345	54			

a. Dependent Variable: y

b. Predictors: (Constant), x3, x2, x1

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	,679	,310		2,186	,033
x1	,223	,040	,248	5,581	,000
x2	,459	,045	,407	10,221	,000
x3	,472	,058	,370	8,130	,000

a. Dependent Variable: y

## **ABSTRACT**

**DIKI CHANDRA. E1117043. THE EFFECT OF THE IMPLEMENTATION OF THE PUBLIC SECTOR AUDIT ON THE PERFORMANCE QUALITY OF LOCAL GOVERNMENTS (A STUDY AT THE AGENCY FOR PERSONNEL AND HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT OF PARIGI MOUTONG DISTRICT)**

*This study aims to find out the effect of the implementation of public sector audits on the performance quality of local government (a study at the Personnel and Human Resources Development Agency of Parigi Moutong District) with 55 apparatuses as respondents. The type of data used is primary data. The data collection techniques carried out are questionnaires and interviews. The analysis method use multiple regression analysis using the SPSS version 21 program. The results of this study indicate that the Public Sector Audit (X) simultaneously has an effect on the Quality of Local Government Performance (Y) at the Personnel and Human Resources Development Agency by 0.679 (67,9%). There are external variables unexamined but affect the variable (Y) by 0. 321 (32,1%). Financial Audit (X1) variable has 0.223 (22.3%), Performance Audit (X2) gains 0.459 (45.9%), and Investigation Audit (X3) obtains 0.472 (47.2%). They partially have a positive and significant effect on the performance quality of local government (Y).*

*Keywords:* public sector, audit, performance quality, local government



## ABSTRAK

### **DIKI CHANDRA. E1117043. PENGARUH PENERAPAN AUDIT SEKTOR PUBLIK TERHADAP KUALITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PARIGI MOUTONG)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Audit Sektor Publik terhadap Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah (studi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong) dengan jumlah responden sebanyak 55 orang pegawai. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, dan wawancara. Metode analisis menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS versi 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Audit Sektor Publik (X) secara Simultan berpengaruh terhadap Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar 0,679 (67,9%), dan terdapat variabel luar yang tidak diteliti tetapi mempengaruhi variabel (Y) sebesar 0,321 atau 32,1%. Variabel Audit Keuanga (X1) sebesar 0,223 atau (22,3%), Audit Kinerja (X2) sebesar 0,459 atau (45,9%), Audit Ivestigasi (X3) sebesar 0,472 atau (47,2%) secara Parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y)





**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0845/UNISAN-G/S-BP/X/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ihsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : DIKI CHANDRA  
NIM : E1117043  
Program Studi : Akuntansi (S1)  
Fakultas : Fakultas Ekonomi  
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Audit Sektor Publik Terhadap Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah (studi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Parigi Moutong)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 34%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 30 Oktober 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



E.11.17.043

## Skripsi\_DIKI CHANDRA.docx

## Sources Overview

 34%  
 OVERALL SIMILARITY

1	jurnal.unpand.ac.id	INTERNET	2%
2	www.scribd.com	INTERNET	2%
3	pt.scribd.com	INTERNET	2%
4	publishing.widyagama.ac.id	INTERNET	1%
5	www.pustaka.ut.ac.id	INTERNET	1%
6	docslide.us	INTERNET	1%
7	aksepkpubc.wordpress.com	INTERNET	1%
8	123dek.com	INTERNET	1%
9	bizzeresera.blogspot.com	INTERNET	1%
10	blintimuchsini.blogspot.com	INTERNET	<1%
11	repository.unhas.ac.id	INTERNET	<1%
12	dwiermayanti.wordpress.com	INTERNET	<1%
13	eprints.ums.ac.id	INTERNET	<1%
14	es.scribd.com	INTERNET	<1%
15	repository.unpas.ac.id	INTERNET	<1%
16	evienvianti.blogspot.com	INTERNET	<1%
17	repository.widyatama.ac.id	INTERNET	<1%
18	repository.upi.edu	INTERNET	<1%
19	mpitirriaanwar.blogspot.com	INTERNET	<1%
20	pebrunesan.ac.id	INTERNET	<1%
21	journal.jaingorontalo.ac.id	INTERNET	<1%
22	farnihsaain.blogspot.com	INTERNET	<1%
23	jurnal.stekma.ac.id	INTERNET	<1%
24	journal.feb.unmul.ac.id	INTERNET	<1%
25	download.garudaristikdikti.go.id	INTERNET	<1%
26	azidoc.com	INTERNET	<1%
27	peraturan.bpk.go.id	INTERNET	<1%

26	id.scribd.com	INTERNET	<1%
29	ilmumanajemendankuntansi.blogspot.com	INTERNET	<1%
30	eprints.unpam.ac.id	INTERNET	<1%
31	andryansme.wordpress.com	INTERNET	<1%
32	scholar.unand.ac.id	INTERNET	<1%
33	a-research.upi.edu	INTERNET	<1%
34	eprints.walisongo.ac.id	INTERNET	<1%
35	e-journal.usjy.ac.id	INTERNET	<1%
36	wartawisata.id	INTERNET	<1%
37	jurnal.umsu.ac.id	INTERNET	<1%
38	www.slideshare.net	INTERNET	<1%
39	eprints.undip.ac.id	INTERNET	<1%
40	digilib.unimus.ac.id	INTERNET	<1%
41	jurnal.unigo.ac.id	INTERNET	<1%
42	makalahubb.blogspot.com	INTERNET	<1%
43	repository.radenintan.ac.id	INTERNET	<1%
44	eprints.unm.ac.id	INTERNET	<1%
45	kim.ung.ac.id	INTERNET	<1%
46	repository.uksw.edu	INTERNET	<1%
47	Ade Damaryanti Vina Giovan, Dini Rosyada. "PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI MAKASSAR", Jurnal Akun Nabela: J-	CDN/INET	<1%
48	fr.scribd.com	INTERNET	<1%
49	www.coursehero.com	INTERNET	<1%
50	easyaccountingsystem.co.id	INTERNET	<1%
51	repository.unwim.ac.id	INTERNET	<1%
52	repository.uma.ac.id	INTERNET	<1%
53	text-id.123dok.com	INTERNET	<1%
54	www.slideserve.com	INTERNET	<1%
55	jurnal.radenfatah.ac.id	INTERNET	<1%
56	skripsiastie.files.wordpress.com	INTERNET	<1%
57	zetaayumeriel.blogspot.com	INTERNET	<1%
58	eprints.iain-surakarta.ac.id	INTERNET	<1%
59	jayawijayakab.go.id	INTERNET	<1%
60	konsultasiskripsi.com	INTERNET	<1%
61	repository.umpalopo.ac.id	INTERNET	<1%

**Excluded search repositories:**

- Submitted Works

**Excluded from document:**

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words)

**Excluded sources:**

- None



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3256/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Diki Chandra  
NIM : E1117043  
Fakultas : Fakultas Ekonomi  
Program Studi : Akuntansi  
Lokasi Penelitian : KANTOR BUPATI KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
Judul Penelitian : PENGARUH PENERAPAN AUDIT SEKTOR PUBLIK  
TERHADAP KUALITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH  
PADA BADAN KEPEGAWAYAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PARIGI  
MOUTONG

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
Jl. Jalur II Kompleks Perkantoran Pemda, Telf. 0450-21937 Fax. 0450-21937 Kode Pos 94371  
**PARIGI**

---

Nomor :

Lampiran :

Hal : Surat Balasan Permohonan izin  
Penelitian

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indah Maulidyah, S.STP

Nip : 19910919 201406 2 001

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Kepegawaian

Unit Kerja : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dengan ini menerangkan bahwa telah memberikan izin untuk melakukan pengambilan Data Kepegawaian Kabupaten Parigi Moutong, yang akan digunakan untuk penyusunan Proposal / Skripsi kepada :

Nama Mahasiswa : Diki Chandra

NIM : E1117043

Fakultas : Fakultas Ekonomi

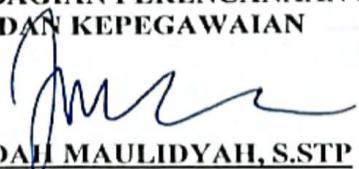
Program Studi : Akuntansi

Lokasi Penelitian : Kantor Bupati Kabupaten Parigi Moutong

Judul Penelitian : PENGARUH PENERAPAN AUDIT SEKTOR PUBLIK TERHADAP KUALITAS  
KINERJA PEMERINTAH PADA KANTOR BUPATI KABUPATEN PARIGI  
MOUTONG

Dikeluarkan di : Parigi  
Pada Tanggal : 25 Mei 2021

**KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM  
DAN KEPEGAWAIAN**

  
INDAH MAULIDYAH, S.STP  
NIP. 19910919 201406 2 001

## KURIKULUM VITAE



### 1. Identitas Pribadi

Nama : Diki Chandra  
Nim : E11.17.043  
Tempat/ Tgl Lahir : Bolano, 23 November 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Angkatan : 2017  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Dr. H.B. Jassin Kel. Libuo Kec. Dungingi kota Gorontalo

### 2. Riwayat pendidikan

- a. Lulus dari Sekolah SD Inpres Bajo, desa Bajo, kecamatan Bolano Lambunu pada tahun 2011
- b. Kemudian melanjutkan ke jenjang SMP di Madrasah Tsanawiyah Negeri Bolano, kec Bolano dan lulus pada tahun 2014
- c. Kemudian melanjutkan ke jenjang SMA di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Bolano, kec. Bolano dan lulus pada tahun 2017
- d. Setelah itu melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Ichsan Gorontalo dengan konsentrasi/jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi pada tahun 2017